

# LAPORAN KAJIAN PENGELOLAAN ARSIP BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

PADA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019



PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Dr. Setiabudi No. 201C, Srandol, Semarang

**LAPORAN KAJIAN**  
**PENGELOLAAN ARSIP BERBASIS**  
**TEKNOLOGI INFORMASI**  
**PADA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. Dr. Setiabudi No. 201C, Srandol, Semarang  
TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia dan rahmatNya sehingga lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan **Laporan Kajian Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi pada LKD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2019** ini.

Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran kondisi terkini Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah terkait dengan pelaksanaan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi. Oleh karena itu, sistematika Laporan ini meliputi Pendahuluan, Kerangka teoritis terkait, Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan, Hasil Kajian dan Pembahasan serta Penutup dan Rekomendasi. Dengan sistematika tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap sesuai dengan rencana pengembangan pengelolaan kearsipan berbasis Teknologi Informasi.

Terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak terkait atas terwujudnya laporan ini dengan baik. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Lembaga Kearsipan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	5
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	6
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	7
A. LATAR BELAKANG .....	7
B. LANDASAN HUKUM .....	9
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	11
<b>BAB II. KERANGKA TEORITIS</b> .....	12
A. ARSIP DAN KEARSIPAN ELEKTRONIK.....	12
B. TATA KELOLA KEARSIPAN ELEKTRONIK .....	13
C. APLIKASI KEARSIPAN ELEKTRONIK.....	16
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	19
<b>BAB III. METODE PELAKSANAAN KAJIAN</b> .....	21
A. KERANGKA PIKIR .....	21
B. LOKASI DAN WAKTU KAJIAN.....	22
C. SUMBER DAN JENIS DATA .....	23
D. METODE PENGUMPULAN DATA.....	23
E. VARIABEL DAN INDIKATOR EMPIRIS .....	25
F. METODE ANALISIS.....	28
<b>BAB IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	30
A. PROFIL RESPONDEN.....	30
B. KELEMBAGAAN .....	31
C. KETATALAKSANAAN.....	34
C.1. Kajian Per Indikator pada Variabel Ketatalaksanaan .....	34
C.2. Kondisi Ketatalaksanaan Per LKD Kabupaten/Kota.....	46
D. SISTEM/APLIKASI KEARSIPAN.....	47
D.1. Kajian per Indikator pada Variabel Aplikasi Kearsipan .....	47
D.2. Kondisi Sistem/Aplikasi per LKD Kabupaten/Kota.....	55
E. SARANA PRASARANA .....	56

E.1. Kajian per Indikator pada Variabel Sarana Prasarana .....	56
E.2. Kondisi Ketersediaan Sarana Prasarana per LKD Kab/Kota.....	63
F. SUMBER DAYA MANUSIA.....	64
F.1. Kajian per Indikator pada Variabel Sumber Daya Manusia .....	64
F.2. Kondisi Sumber Daya Manusia per LKD Kabupaten/Kota .....	70
G. RESUME PER INDIKATOR EMPIRIS .....	72
H. RESUME PER LKD KABUPATEN/KOTA .....	74
I. ANALISIS KAJIAN .....	76
<b>BAB IX. PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
A. KESIMPULAN.....	82
B. REKOMENDASI .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Proses .....	21
Gambar 2. Kerangka Pikir Olah Data .....	22
Gambar 3. Peta Administratif Provinsi Jawa Tengah .....	22
Gambar 4. Tingkat Penerapan UU No 11 tahun 2008 .....	35
Gambar 5. Tingkat Penerapan UU No 14 tahun 2008 .....	36
Gambar 6. Tingkat Penerapan UU No 43 tahun 2009 .....	38
Gambar 7. Tingkat Penerapan UU No 25 tahun 2009 .....	39
Gambar 8. Tingkat Penerapan PP No 28 Tahun 2012 .....	40
Gambar 9. Ketersediaan regulasi penyelenggaraan kearsipan .....	41
Gambar 10. Penerapan regulasi penyelenggaraan kearsipan .....	42
Gambar 11. Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 17 Tahun 2011 .....	43
Gambar 12. Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 14 Tahun 2012 .....	44
Gambar 13. Skor Ketatalaksanaan LKD Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah ..	45
Gambar 14. Keanggotaan dalam SIKN/JIKN .....	49
Gambar 15. Pemanfaatan SIKD dari ANRI .....	50
Gambar 16. Pemanfaatan SIKD diluar ANRI .....	51
Gambar 17. Pemanfaatan SIKS dari ANRI .....	52
Gambar 18. Pemanfaatan SIKS diluar ANRI .....	53
Gambar 19. Ketersediaan <i>software</i> SIKD/SIKS dari ANRI .....	57
Gambar 20. Ketersediaan <i>software</i> SIKD/SIKS di luar ANRI .....	58
Gambar 21. Ketersediaan Subdomain untuk SIKD/SIKS ANRI .....	59
Gambar 22. Ketersediaan Subdomain untuk SIKD/SIKS di luar ANRI .....	60
Gambar 23. Ketersediaan Perangkat Keras untuk SIKD/SIKS ANRI .....	61
Gambar 24. Ketersediaan <i>Hardware</i> untuk SIKD/SIKS selain dari ANRI .....	62
Gambar 25. Latar belakang pendidikan SDM Pengelola Arsip .....	65
Gambar 26. Latar belakang pendidikan Arsiparis Pengelola Arsip .....	66
Gambar 27. Penugasan SDM Pengelola Arsip .....	67
Gambar 28. Pengembangan SDM Arsiparis .....	68
Gambar 29. Pengembangan SDM Non Arsiparis .....	70
Gambar 30. The Outer Model Test .....	74
Gambar 31. Radar Chart kondisi LKD Kab/Kota di Jateng .....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variabel dan Indikator Empiris.....	26
Tabel 2. Skoring dengan skala Likert.....	29
Tabel 3. Identitas Responden.....	30
Tabel 4. Data Kelembagaan.....	32
Tabel 5. Penerapan UU No 11 Tahun 2008 pada LKD Kab/Kota.....	34
Tabel 6. Penerapan UU No 14 Tahun 2008 pada LKD Kab/Kota.....	36
Tabel 7. Penerapan UU No 43 Tahun 2009 pada LKD Kab/Kota.....	37
Tabel 8. Penerapan UU No 25 Tahun 2009 pada LKD Kab/Kota.....	38
Tabel 9. Penerapan PP No 28 Tahun 2012 pada LKD Kab/Kota.....	39
Tabel 10. Keberadaan Peraturan di tingkat Kab/Kota .....	41
Tabel 11. Penerapan Peraturan Kearsipan di tingkat Kab/Kota.....	42
Tabel 12. Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 17 Tahun 2011 .....	43
Tabel 13. Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 14 Tahun 2012 .....	44
Tabel 14. Skor Variabel Ketatalaksanaan LKD Kab/Kota Provinsi Jateng .....	45
Tabel 15. Skor Variabel Ketatalaksanaan per LKD Kab/Kota .....	46
Table 16. Keikutsertaan dalam SIKN/JIKN .....	48
Tabel 17. Pemanfaatan SIKD dari ANRI .....	50
Tabel 18. Pemanfaatan SIKD selain dari ANRI .....	51
Tabel 19. Pemanfaatan SIKS dari ANRI.....	52
Tabel 20. Pemanfaatan SIKS diluar ANRI.....	53
Tabel 21. Skor Variabel Ketatalaksanaan per LKD Kab/Kota .....	55
Tabel 22. Ketersediaan Software SIKD/SIKS ANRI.....	56
Tabel 23. Ketersediaan Software SIKD/SIKS selain dari ANRI .....	57
Tabel 24. Ketersediaan Sub domain untuk SIKD/SIKS ANRI.....	59
Tabel 25. Ketersediaan Sub domain untuk SIKD/SIKS Selain ANRI.....	60
Tabel 26. Ketersediaan Perangkat Keras untuk SIKD/SIKS ANRI .....	61
Tabel 27. Ketersediaan Perangkat Keras untuk SIKD/SIKS selain dari ANRI .....	62
Tabel 28. Skor Variabel Ketatalaksanaan per LKD Kab/Kota .....	63
Tabel 29. Latar Belakang Pendidikan SDM Pengelola Arsip berbasis TI .....	64
Tabel 30. Latar Belakang Pendidikan SDM Arsiparis pengelola arsip berbasis TI.....	66
Tabel 31. Penugasan SDM Pengelola Arsip berbasis TI .....	67
Tabel 32. Pengembangan SDM Arsiparis.....	68
Tabel 33. Pengembangan SDM Non Arsiparis.....	69
Tabel 34. Skor Variabel Sumber Daya Manusia per LKD Kab/Kota .....	71
Tabel 35. Karakteristik Indikator Empiris.....	72
Tabel 36. Causality Test Result .....	73
Tabel 35. Skor 4 variabel per LKD Kab/Kota.....	75

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 ayat (2) mengamanatkan bahwa urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, baik Daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Hal itu diperkuat oleh Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan arsip era berlakunya Undang-Undang No 43 tahun 2009, memang bukan hal yang mudah. Pengelolaan arsip menghadapi tantangan globalisasi dan diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Arsip merupakan salah satu sumber data dari segala kegiatan organisasi, sehingga perlu ditata dengan baik agar dapat mendukung adanya penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Arsip juga perlu dikelola agar mampu mengimbangi tingginya dinamika dan aktivitas dalam suatu lembaga. Masalah yang muncul adalah masih banyak organisasi kelembagaan saat ini yang masih melakukan pengelolaan arsip secara konvensional karena dihadapkan pada berbagai keterbatasan baik

fasilitas maupun sumber daya manusia. Padahal pengelolaan arsip yang dilakukan secara konvensional memiliki berbagai kendala, terutama dalam hal penyediaan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Pengelolaan arsip konvensional yang mengandalkan tenaga manusia saja, seringkali kurang sistematis, menyebabkan adanya penumpukan arsip, terselipnya arsip di tempat yang tidak semestinya, atau bahkan hilang. Padahal hilangnya arsip berarti juga kehilangan data, informasi, dan bukti tentang suatu hal atau kegiatan dalam suatu organisasi. Seringkali pencarian data arsip dilakukan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menghambat pengambilan keputusan krusial yang seharusnya cepat dilakukan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kearsipan, perlu dilakukan untuk melakukan penekanan atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip secara konvensional seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pengelolaan arsip melalui teknologi informasi atau yang sering disebut "arsip elektronik" memberikan banyak keuntungan sebagai berikut. Pertama, proses penemuan dan penyajian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan lengkap. Cepat berarti membutuhkan sedikit waktu. Sedangkan lengkap berarti semua yang diperlukan dapat terlayani dan tidak ada yang terlewatkan. Kedua, pendistribusian atau akses informasi dapat dilakukan dengan cepat, dalam waktu yang sama dapat digunakan oleh banyak pihak. Ketiga, penyimpanan Informasi dapat dilakukan secara terpusat, sehingga tidak terjadi duplikasi informasi. Hal ini membuat sistem memiliki tingkat keakuratan dalam penyimpanan yang tinggi. Selain manfaat efisien transaksi dokumen, penerapan sistem kearsipan elektronik juga akan memberikan manfaat secara ekonomis. Dari perspektif bisnis, penyimpanan dan penanganan dokumen secara elektronik membantu perusahaan untuk mengelola dokumen dengan biaya pengelolaan rendah. Pengelolaan arsip secara elektronik dapat menghemat kertas (*paperless*), tempat penyimpanan, dan ruangan karena arsip disimpan dalam bentuk digital.

Penerapan arsip secara elektronik juga sudah didukung Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, khususnya pasal 68 dimana pencipta arsip dan atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan atau media yang lainnya. Keabsahan arsip elektronik secara hukum juga sudah dituliskan dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 5 dimana informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal itu diperkuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, khususnya pasal 24 dimana dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau non-elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan arsip elektronik berbasis Teknologi Informasi merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan akuntabilitas pemerintah terkait peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan Kajian atas Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi pada seluruh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Berikut adalah dasar hukum pelaksanaan kegiatan Kajian Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kegiatan Kajian Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan gambaran sejauh mana pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2019.
2. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi pada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Merumuskan rekomendasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi pada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

## **D. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Berikut adalah sistematika dari Laporan Kegiatan Kajian Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ini.

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi tentang pembahasan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika pelaporan.

### **BAB II. KERANGKA TEORITIS**

Berisi kajian teori terkait dengan arsip dan kearsipan elektronik, tata kelola kearsipan elektronik, aplikasi kearsipan elektronik dan sumber daya manusia.

### **BAB III. METODE PELAKSANAAN KAJIAN**

Berisi pembahasan tentang kerangka pikir, lokasi dan waktu kajian, variabel dan indikator, metode pengumpulan data serta metode analisa data.

### **BAB IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil kajian pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi yang diantaranya meliputi profil responden, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem/aplikasi kearsipan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia.

### **BAB IX. PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan.

## BAB II. KERANGKA TEORITIS

### A. ARSIP DAN KEARSIPAN ELEKTRONIK

Pada dasarnya arsip elektronik merupakan informasi yang direkam dan disimpan dalam media elektronik dengan wujud digital. *National Archive and Record Administration* (NARA) USA mendefinisikan arsip elektronik merupakan arsip-arsip yang disimpan dan diolah di dalam suatu format, dimana hanya komputer yang dapat memprosesnya. Sedangkan menurut *Australia Archive* dalam buku *Managing Electronic Record*, arsip elektronik adalah arsip yang tercipta dan terpelihara sebagai bukti dari transaksi, aktivitas dan fungsi lembaga atau individu yang ditransfer dan diolah didalam dan di antara sistem komputer. Pendapat senada disampaikan oleh Wallace yang mengatakan bahwa berkas elektronik terdiri dari himpunan informasi yang terekam dalam bentuk kode yang dapat dibaca dan disimpan pada beberapa media sehingga dapat ditemukan kembali, dibaca dan digunakan (Wallace, 1992; Sugiarto, 2015).

Arsip elektronik memiliki daur hidup mulai dari penciptaan, penyimpanan dan penemuan kembali, pengolahan (manupulasi), pendistribusian, dan penyusutan. Daur hidup arsip elektronik pada dasarnya sama dengan pengelolaan arsip secara konvensional. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan arsip elektronik adalah kecepatan dan ketepatan dalam penemuan kembali arsip atau informasi. Menurut *The Georgian Archives*, arsip atau dokumen elektronik dapat berasal dari dari berbagai bentuk, yaitu semua dokumen, kertas, surat, peta, buku (kecuali yang dikelola oleh perpustakaan), microfilm, magnetic tape, atau bahan lain tanpa menghiraukan bentuk fisik atau karakteristik, dibuat dan diterima menurut undang-undang. Sedangkan menurut *International Standart Organization* (ISO), arsip adalah informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk data dalam komputer, dibuat atau diterima serta dikelola oleh organisasi maupun orang dalam transaksi

bisnis, dan menyimpannya sebagai bukti aktivitas (ISO/DIS15489) (Sukoco, 2007).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan Informasi Elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## **B. TATA KELOLA KEARSIPAN ELEKTRONIK**

Rolt mengungkapkan bahwa EDM (*Electronic Document Management*) adalah pengelolaan berbagai jenis dokumen dalam organisasi yang menggunakan program komputer dan penyimpanan. Sebuah sistem EDM memungkinkan suatu organisasi dan pengguna untuk membuat dokumen, memindai *hard copy* dalam bentuk elektronik dan menyimpan, mengedit, mencetak, proses, dan juga mengelola dokumen (Rolt, 2007).

Terkait dengan manajemen arsip elektronik, Siatiras juga berpendapat bahwa manajemen dokumen elektronik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan alat dan proses untuk mengelola dokumen elektronik dan catatan. Sebuah sistem manajemen dokumen elektronik adalah alat perangkat lunak yang khusus dirancang untuk menggambarkan dan mengelola informasi elektronik tidak terstruktur dengan cara yang terkontrol dan konsisten (Siatiras, 2004).

Kehadiran teknologi dalam kegiatan perkantoran, memungkinkan dilakukan pengelolaan arsip melalui media elektronik. Melalui media ini diharapkan pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan lebih baik. Berikut ini merupakan beberapa keuntungan manajemen tata kelola arsip elektronik dibandingkan dengan pengelolaan arsip secara konvensional:

- a. Proses penemuan dan penyajian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan lengkap. Cepat berarti membutuhkan sedikit waktu. Sedangkan lengkap berarti semua yang diperlukan dapat terlayani dan tidak ada yang terlewatkan.
- b. Pendistribusian atau akses informasi dapat dilakukan dengan cepat, dalam waktu yang sama dapat digunakan oleh banyak pihak.
- c. Penyimpanan Informasi dapat dilakukan secara terpusat, sehingga tidak terjadi duplikasi informasi.
- d. Memiliki tingkat keakuratan dalam penyimpanan yang tinggi.
- e. Dapat menghemat kertas (*paperless*), tempat penyimpanan, dan ruangan karena arsip disimpan dalam bentuk digital.

Selain manfaat efisien transaksi dokumen, penerapan sistem kearsipan elektronik akan memberikan manfaat secara ekonomis. Dari perspektif bisnis, penyimpanan dan penanganan dokumen secara elektronik membantu perusahaan untuk mengelola dokumen dengan biaya pengelolaan rendah (Thilmany, 2009). Lebih lanjut, ada beberapa manfaat dalam penggunaan sistem kearsipan elektronik (Sukoco, 2007):

- a. Cepat ditemukan, dan memungkinkan pemanfaatan arsip atau dokumen tanpa meninggalkan meja kerja.
- b. Pengindeksan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi berdasarkan prosedur yang telah dikembangkan akan menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Bandingkan dengan mengubah sistem indeks kertas yang mengakibatkan berlaku hal sebaliknya.
- c. Pencarian secara *full-text*, dengan mencari file berdasarkan kata kunci maupun nama file

Sedangkan menurut Siatiras, penerapan manajemen kearsipan elektronik memiliki beberapa manfaat, yaitu (Siatiras, 2004):

- a. Peningkatan efisiensi dalam pelayanan terhadap klien internal dan eksternal
- b. Peningkatan berbagi informasi antara staf dan kantor
- c. Mengurangi kewajiban / manajemen risiko

- d. Peningkatan keamanan informasi
- e. Peningkatan pencatatan dan administrasi informasi
- f. Keamanan yang fleksibel di tingkat dokumen, bukan hanya di level direktori versi kontrol
- g. Peningkatan proses informasi dan *auditability*
- h. Tidak ada duplikasi dokumen
- i. Peningkatan akses ke informasi

Di samping keuntungan yang dapat diperoleh dengan penggunaan arsip elektronik, terdapat pula beberapa kerugian atau kelemahan. Kelemahan pengelolaan arsip secara elektronik harus disadari oleh para pengelola. Adapun beberapa kelemahan pengelolaan arsip secara elektronik yaitu:

- a. Biaya pengadaan alat-alat dan sistem yang relatif tinggi. Namun demikian besarnya biaya yang digunakan untuk pengadaan alat-alat elektronik jangan dianggap sebagai beban, melainkan sebagai suatu investasi, dimana suatu saat akan lebih menguntungkan.
- b. Kemungkinan dilakukan perubahan informasi atau manipulasi informasi.
- c. Ketergantungan terhadap perangkat lunak dan keras yang berkembang pesat. Semakin cepatnya inovasi dan kemajuan teknologi, membuat media atau alat yang kita miliki cepat usang dan ketinggalan jaman.
- d. Terbatasnya daya tahan media fisik penyimpanan arsip elektronik.

Selain itu, Skupsky mengungkapkan beberapa kelemahan tambahan dari pengelolaan arsip secara elektronis yang perlu dipertimbangkan oleh organisasi, yaitu (Skupsky, 1999):

- a. Adanya peluang untuk memanipulasi file, menciptakan, menyimpan, memodifikasi, atau menghapus dalam segala cara,
- b. Kesulitan untuk berbagai file karena format file maupun ketersediaan jaringan maupun akses untuk berbagi file dengan yang lain,

- c. Kemungkinan rusaknya file setiap saat tanpa adanya indikasi terlebih dahulu, misalnya *server* terserang virus atau terhapus permanen karena tidak sengaja.

## **C. APLIKASI KEARSIPAN ELEKTRONIK**

Bicara tentang sistem kearsipan elektronik, tidak hanya mengenai software atau perangkat lunak, tetapi juga terkait dengan hardware dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penerapan sistem tersebut.

### **a. Software Arsip Elektronik**

Saat ini sudah banyak dikembangkan *software* kearsipan elektronik. Software ini memiliki fitur-fitur yang lengkap untuk sebuah tata kelola arsip sebagaimana kearsipan konvensional pada umumnya. Salah satu fitur yang ada seperti *document management* sampai pada *user management*. *Document management* digunakan untuk pengelolaan dokumen yang meliputi kegiatan memasukan dokumen (input dokumen) dan Pencarian Dokumen dengan melalui kata kunci yang diinginkan. Sedangkan *User Management* digunakan untuk mengatur hak akses aplikasi termasuk mengatur siapa saja yang berhak menggunakan atau mengakses aplikasi tersebut. Hal ini merupakan perwujudan dari manajemen keamanan sistem yang telah dirancang dan dibangun. Manajemen keamanan sistem merupakan aktivitas agar sumber daya informasi tetap aman, sedangkan salah satu tujuan dari keamanan informasi adalah Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasinya dari pengungkapan dari orang-orang yang tidak berwenang.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sendiri sudah mengembangkan *software* Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) sebagai upaya pengembangan *e-government* dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. SIKN merupakan aplikasi antar-muka yang dapat digunakan oleh Simpul Jaringan untuk memasukkan informasi kearsipan miliknya dan selanjutnya dipublikasikan pada *website* Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Disamping itu,

aplikasi ini dapat juga digunakan oleh Simpul Jaringan untuk mengolah informasi kearsipan yang dimiliki dalam rangka membantu temu balik, baik dalam format digital maupun lokasi fisik arsip di tempat penyimpanannya. Pencarian informasi kearsipan dapat dilakukan dengan berbagai kategori, meliputi: deskripsi arsip, pencipta arsip, fungsi, repositori (tempat penyimpanan), subjek, tempat, serta objek digitalnya. Disamping itu, aplikasi ini memungkinkan juga instansi mengetahui arsip mana yang paling sering diakses oleh pengguna.

Aplikasi lain yang dikembangkan ANRI adalah Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). SIKS digunakan untuk membantu menangani pengelolaan arsip statis di lingkungan lembaga kearsipan serta menyajikannya untuk dapat diakses oleh masyarakat. Arsip statis sendiri merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi. Sedangkan SIKD merupakan software sistem pengelolaan manajemen kearsipan secara elektronik yang dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). SIKD ini merupakan langkah ANRI sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan tertib arsip di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia.

Aplikasi SIKD ini dibuat berdasarkan peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 15 Tahun 2015 tentang aplikasi SIKD dan SIKS yang sejalan dengan program pemerintah yang mengamanatkan proses surat menyurat di lingkungan kementerian / lembaga dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga lebih cepat, aman dan sesuai dengan prosedur.

## **b. Media Penyimpanan Arsip Elektronik**

Suatu informasi dapat disebut arsip apabila informasi tersebut terekam di dalam berbagai bentuk media penyimpanan. Arsip elektronik menyimpan informasi di dalam suatu media yang bersifat magnetik dan karena informasi arsip elektronik melekat di dalam media penyimpanan

maka perlu dipertimbangkan secara hati-hati penggunaan media simpan tersebut.

Dalam pemilihan media penyimpanan arsip elektronik harus mengenal tipe media yang tepat dan memilih jenis yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyimpanan. Ada beberapa media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data dan informasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

- a. Pita magnetik merupakan media penyimpan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada pita kaset. Pita magnetik dibedakan atas dua macam yaitu *reel tape* dan *cartridge tape*. *Reel tape* merupakan pita magnetik yang digulung dalam wadah berbentuk lingkaran sedangkan *cartridge tape* berbentuk seperti kaset video dan audio.
- b. Piringan magnetik merupakan media penyimpan berbentuk disk. Ada dua jenis piringan magnetik yaitu disk permanen yang lebih dikenal dengan *hard disk* dan *disk* fleksibel yang disebut *floppy disk* atau disket.
- c. Piringan optik merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket. Piringan optik dapat berupa CD (*Compact Disc*), DVD (*Digital Video Disc*) dan *Blue Ray*.
- d. UFD (*USB Flash Disc*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena dimana cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke port USB. Menurut klaim produsen, alat ini mampu merekam 1 juta kali dan tahan disimpan sampai 10 tahun.
- e. Kartu memori (*memory card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastic tipis yang biasa digunakan pada PDA, kamera digital, ponsel, maupun *handy came*. Saat ini terdapat jenis yang beragam kartu memori seperti *compact flash*, *multimedia card* (MMC), *smart card*, *memory stick*, *memory stick duo*, *secure digital card* (SD Card), dan *mini secure digital*.

### **c. Pemilihan Hardware dan Infrastruktur**

Untuk melakukan pemilihan *hardware*, kita harus membandingkan beberapa kategori perangkat keras yang ada menurut kemampuan, kapasitas dan keandalan yang dimiliki dengan tidak lupa memperhitungkan biaya dan kompatibilitasnya dengan perangkat keras lain.

**Kemampuan *hardware*** yang dianalisa menyangkut kecepatan proses, kapasitas penyimpanan (*storage*), mutu keluaran (*output*), kemudahan melakukan input, dan lain-lain. Sedangkan kapasitas yang dimaksud, diukur berdasarkan jumlah transaksi yang dapat diproses dalam suatu periode tertentu.

**Keandalan *hardware*** berkaitan dengan frekuensi kemungkinan terjadinya kegagalan proses secara teknis, termasuk kemungkinan kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor ekseternal seperti arus listrik yang tidak stabil, kebakaran, banjir dan lain sebagainya.

**Fleksibilitas dan kompatibilitas** suatu perangkat dengan perangkat lain juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Banyak komponen perangkat keras yang dapat dioperasikan sedemikian canggihnya namun tidak kompatibel jika dihubungkan dengan perangkat keras lain. Hal itu akan membatasi ruang gerak pengembangan sistem nantinya dan mempersulit perawatan sistem itu sendiri.

Biaya-biaya yang diperhitungkan mencakup harga beli, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan dan biaya operasi yang mencakup biaya upah dan utilitas.

### **D. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia yang memadai merupakan salah satu kunci pokok keberhasilan penerapan pengelolaan arsip berbasis TI. Secara umum SDM kearsipan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan khususnya pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa SDM di bidang kearsipan atau dikenal arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal

dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

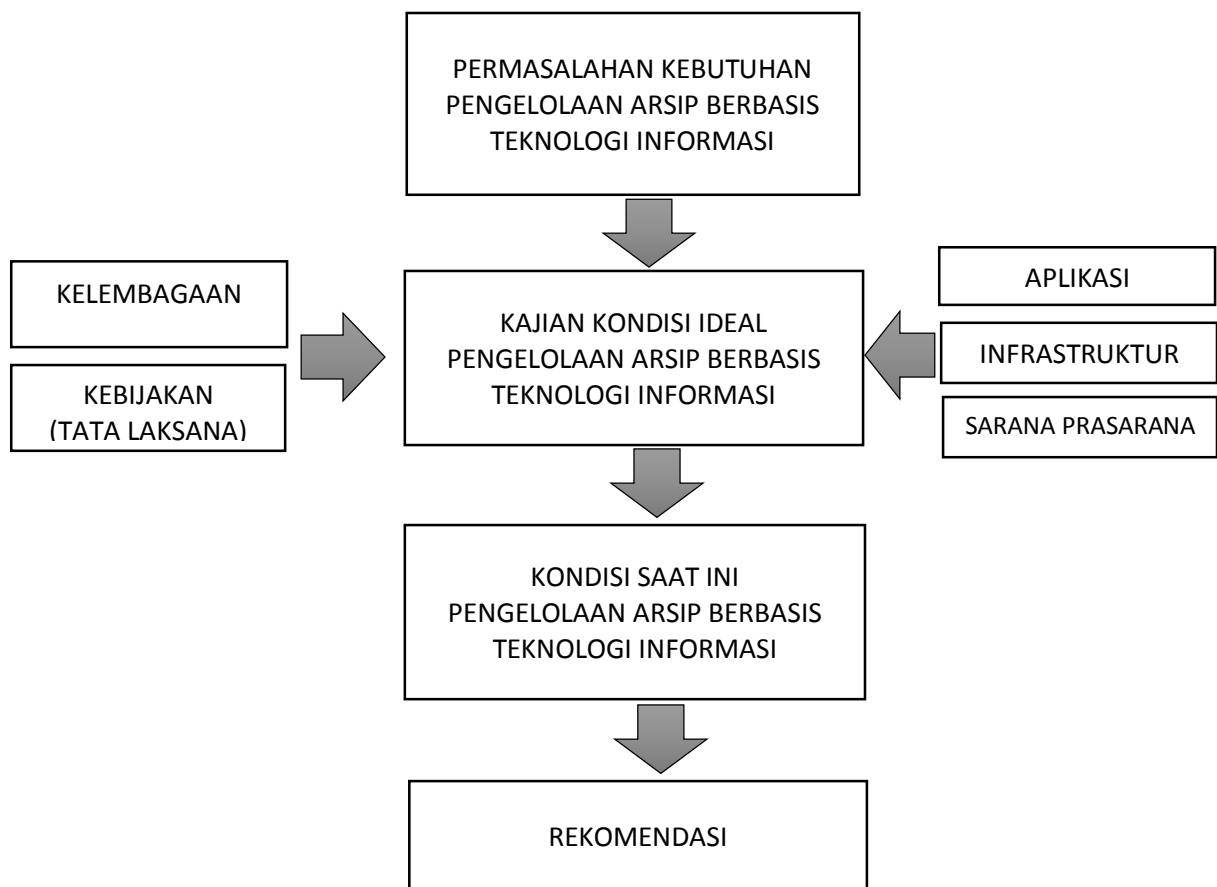
Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah, tidak termasuk kegiatan mengurus, memberkaskan dan mengelola arsip-arsip aktif. Kegiatan kearsipan adalah kegiatan dalam bidang pembinaan, pengelolaan dan pelayanan arsip, penilaian dan penyeleksian arsip serta pemasyarakatan arsip.

Pengakuan Arsiparis sebagai jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014, didukung oleh persyaratan profesionalisme yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri.

## BAB III. METODE PELAKSANAAN KAJIAN

### A. KERANGKA PIKIR

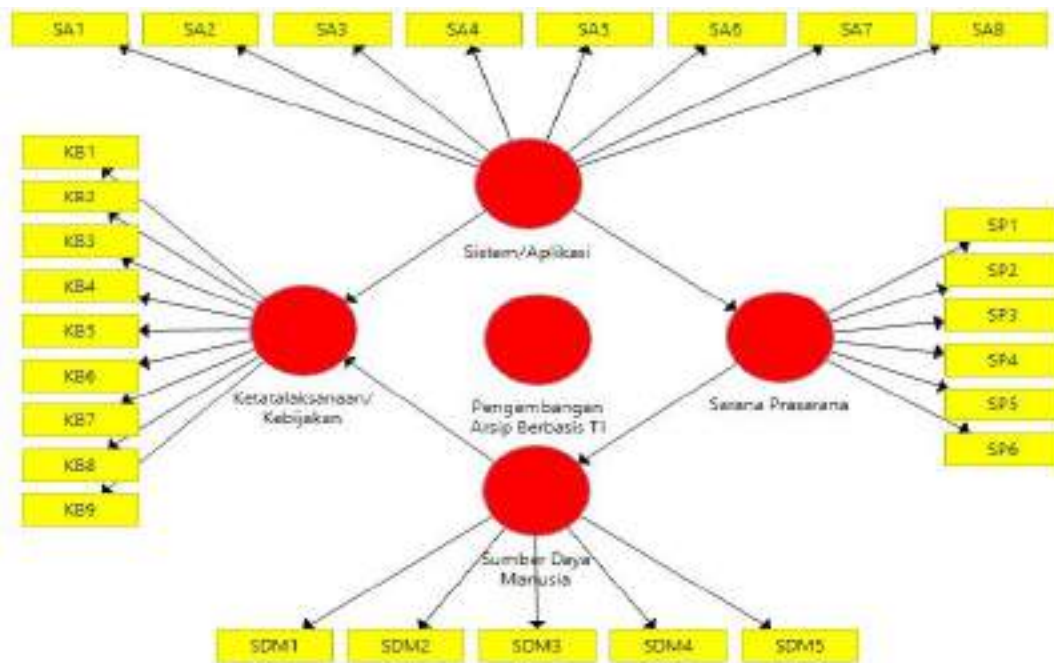
Berikut adalah kerangka pikir pelaksanaan Kajian Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi pada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.



**Gambar 1. Kerangka Pikir Proses**

Dari sisi pengolahan data, terdapat beberapa faktor yang diduga mampu mendukung upaya pengembangan arsip berbasis IT seperti Kelembagaan, Ketatalaksanaan/Kebijakan, Sistem/Aplikasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia berisi pembahasan tentang kerangka pikir. Dari kelima faktor tersebut, kelembagaan tidak dimasukkan dalam analisis data karena secara umum syarat kelembagaan sudah dipenuhi dengan adanya lembaga khusus yang menangani kearsipan di setiap

kabupaten/kota dengan dasar hukum yang telah tersedia dengan baik (dalam perda maupun perbup/perwalkot). Dengan demikian, fokus pengolahan data mengacu pada 4 variabel sebagai berikut.



**Gambar 2. Kerangka Pikir Olah Data**

## B. LOKASI DAN WAKTU KAJIAN

Kajian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah khususnya pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3 di bawah.



**Gambar 3. Peta Administratif Provinsi Jawa Tengah**

Waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan, dari bulan Pebruari sampai dengan Juli 2019, dengan 2 (satu) bulan pertama untuk pengambilan data, 2 bulan kedua untuk pengolahan data dan 2 bulan terakhir untuk penyusunan laporan akhir kegiatan.

### **C. SUMBER DAN JENIS DATA**

Sumber data pada kajian ini berasal dari Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan *instrument* yang diambil dari sumber utama secara langsung. Data primer ini merupakan data pokok yang digunakan dalam penelitian. Dengan pengertian tersebut bisa dipahami bahwa pengumpulan data primer melibatkan kontak atau komunikasi langsung antara peneliti dan sumber data atau pemberi informasi. Beberapa metode dalam pengambilan data primer ini diantaranya adalah kuesioner, wawancara dan observasi atau pengamatan langsung.

Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara. Data sekunder juga disebut sebagai data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama. Beberapa yang termasuk data sekunder adalah dokumen seperti literatur atau naskah akademik, koran, majalah, pamflet, dan lain sebagainya sebagai data sekunder.

### **D. METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam sebuah penelitian, metode pengumpulan data merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan karena berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data dan alat yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut.

Karena subyek penelitian adalah Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, maka teknik penetapan sampel yang digunakan adalah *Total Sampling*. Menurut Sugiyono (2017) teknik pengambilan sampel ini didasari atas pertimbangan bahwa jumlah sampel

sama dengan jumlah populasi. Dapat dipahami jika jumlah populasi kurang dari 100 responden, maka seluruh populasi akan dijadikan sebagai sampel kajian.

Selanjutnya pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Kuesioner

Kuesioner atau angket menurut Sugiyono (2017) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup. Pada kuesioner tertutup, responden cukup menjawab dengan memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Sedangkan pada pertanyaan terbuka, responden diberi keleluasaan untuk menjawab pertanyaan dengan lebih terbuka. Berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan metode kuesioner tersebut:

- Menghemat waktu, maksudnya dengan waktu yang singkat dapat memperoleh data.
- Menghemat biaya, karena tidak memerlukan banyak peralatan.
- Menghemat sumber daya atau tenaga dalam melakukan pengumpulan data.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan jika informasi dalam kuesioner membutuhkan penjelasan lebih jauh. Menurut Sugiyono (2017) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan

demikian, wawancara memiliki kelebihan untuk mendapatkan kedalaman informasi yang diinginkan.

#### c. Studi Literatur

Studi literatur adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari literatur buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Secara lebih lengkap, studi literatur dilakukan sebelum melakukan penelitian bertujuan untuk:

- Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti.
- Mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diselesaikan.
- Mencari landasan teori yang merupakan pedoman bagi pendekatan pemecahan masalah dan pemikiran untuk perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.
- Memperdalam pengetahuan tentang masalah dan bidang yang akan dikaji.
- Menelaah hasil kajian yang pernah dilakukan sebelumnya dan mendapat informasi tentang aspek-aspek yang sudah pernah diteliti.

### **E. VARIABEL DAN INDIKATOR EMPIRIS**

Kajian ini menggunakan instrumen kuesioner yang disebar kepada 35 LKD di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Kuesioner dalam kajian ini terdiri dari 4 konsep utama yang meliputi: (1) Ketatalaksanaan/Kebijakan; (2) Sistem/Aplikasi; (3) Sarana Prasarana dan (4) Sumber Daya Manusia. Sedangkan masing-masing konsep memiliki indikator empiris yang dapat diterjemahkan melalui berbagai pertanyaan. Konsep ketatalaksanaan/kebijakan terdiri atas 9 indikator empiris, konsep sistem/aplikasi terdiri atas 8 indikator empiris, konsep sarana prasarana

terdiri atas 6 indikator empiris dan konsep sumber daya manusia terdiri atas 5 indikator empiris. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah.

**Tabel 1. Variabel dan Indikator Empiris**

No.	Variabel	Indikator Empiris
1	Ketatalaksanaan/Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagai Dasar Hukum dalam Pengelolaan Arsip berbasis IT telah diterapkan?</li> <li>2. Apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar hukum dalam Pengelolaan Arsip berbasis IT telah diterapkan?</li> <li>3. Apakah Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan sebagai dasar hukum dalam Pengelolaan Arsip berbasis IT telah diterapkan?</li> <li>4. Apakah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum dalam Pengelolaan Arsip berbasis IT telah diterapkan?</li> <li>5. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan sebagai dasar hukum dalam Pengelolaan Arsip berbasis IT telah diterapkan?</li> <li>6. Apakah tersedia peraturan/regulasi tentang penyelenggaraan kearsipan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan arsip berbasis IT?</li> <li>7. Apakah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan Kearsipan sebagai dasar hukum dalam Pengelolaan Arsip berbasis IT telah diterapkan?</li> <li>8. Apakah Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) sebagai dasar hukum dalam Pengelolaan Arsip berbasis IT telah diterapkan?</li> <li>9. Apakah Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum</li> </ol>

		Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai dasar penyusunan pedoman Arsip berbasis IT telah diterapkan?
2	Sistem/Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pengelolaan arsip berbasis IT telah menjadi bagian dari anggota jaringan SIKN/JIKN?</li> <li>2. Apakah pengelolaan arsip dinamis berbasis IT telah memanfaatkan SIKD dari ANRI?</li> <li>3. Apakah pengelolaan arsip dinamis berbasis IT telah memanfaatkan SIKD selain ANRI?</li> <li>4. Apakah pengelolaan arsip statis berbasis IT telah memanfaatkan SIKS dari ANRI?</li> <li>5. Apakah pengelolaan arsip statis berbasis IT telah memanfaatkan SIKS selain dari ANRI?</li> <li>6. Bagaimana kemudahan dalam pengelolaan arsip dinamis/statis berbasis IT dari ANRI?</li> <li>7. Bagaimana kemudahan dalam pengelolaan arsip dinamis/statis berbasis IT selain ANRI?</li> <li>8. Bagaimana kemanfaatan pengelolaan arsip dinamis/statis berbasis IT?</li> </ol>
3	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah sudah tersedia software Aplikasi SIKD/SIKS dari ANRI?</li> <li>2. Apakah sudah tersedia software Aplikasi SIKD/SIKS selain ANRI?</li> <li>3. Apakah sudah tersedia subdomain yang disediakan Diskominfo pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk aplikasi SIKD/SIKS dari ANRI?</li> <li>4. Apakah sudah tersedia subdomain yang disediakan Diskominfo pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk aplikasi SIKD/SIKS selain ANRI?</li> <li>5. Apakah sudah tersedia perangkat keras (server/pc/scanner) untuk mendukung aplikasi SIKD/SIKS dari ANRI?</li> <li>6. Apakah sudah tersedia perangkat keras (server/pc/scanner) untuk mendukung aplikasi SIKD/SIKS selain ANRI?</li> </ol>
4	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah latar belakang pendidikan SDM pengelola arsip berbasis IT?</li> </ol>

		<p>2. Bagaimanakah latar belakang pendidikan SDM Arsiparis pengelola arsip berbasis IT?</p> <p>3. Bagaimanakah sistem penugasan SDM pengelola arsip berbasis IT?</p> <p>4. Bagaimanakah sistem pengembangan SDM pengelola arsip berbasis IT bagi Arsiparis?</p> <p>5. Bagaimanakah sistem pengembangan SDM pengelola arsip berbasis IT bagi Non Arsiparis?</p>
--	--	--

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

## F. METODE ANALISIS

Untuk melakukan analisa dari data-data yang sudah dikumpulkan, digunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan sesudah data dari seluruh responden atau sumber data-data lain semua terkumpul. Analisa kuantitatif ini sering juga disebut dengan metode tradisional, *positivistik*, *scientific* dan juga metode *discovery*. Dinamakan metode tradisional sebab metode ini sudah cukup lama dipakai sehingga sudah dianggap sebagai metode tradisi untuk sebuah penelitian.

Analisa dengan pendekatan ini juga disebut sebagai metode *positivistik* sebab juga berlandaskan kepada filsafat positivisme. Metode atau teknik ini disebut sebagai metode yang *scientific*, disebabkan metode ini memiliki kaidah-kaidah ilmiah yang terpenuhi yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis.

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam kajian ini meliputi analisa diskriptif dan analisis skoring. Statistika deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku dalam umum atau generalisasi. Sedangkan analisis skoring digunakan untuk mengetahui skor atau kondisi kesiapan penerapan arsip berbasis teknologi informasi di LKD kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Skoring dilakukan dengan evaluasi kuantitas menggunakan ukuran kuantitatif (angka) dalam pengukuran setiap komponen atau dimensi. Kuesioner tertutup menggunakan skala Likert dengan empat kategori dengan skor 1 - 4. Sedangkan jumlah kategori evaluasi terdiri dari 4 kategori yaitu Kurang Baik, Cukup, Baik, dan Sangat Baik.

**Tabel 2. Skoring dengan skala Likert**

Kategori	Range Skor Mean
Kurang Baik	1,00 - 1,75
Cukup	1,76 - 2,50
Baik	2,51 - 3,25
Sangat Baik	3,26 - 4,00

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

## BAB IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

### A. PROFIL RESPONDEN

Kegiatan Kajian Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi ini melibatkan 35 responden yang meliputi 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah. Berikut adalah identitas 35 responden tersebut.

**Tabel 3. Identitas Responden**

No	Kabupaten/Kota	Nama Lembaga Kearsipan Daerah	Nama Kepala LKD	Tahun Berdiri
1	Cilacap	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap	Supriyanto, SH, M.Si	2017
2	Banyumas	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Ir. Djoko Wikanto, M.M	2017
3	Purbalingga	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Drs. Sridadi, M.M	1999
4	Banjarnegara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara	Gatur Subandrio, S.Sos	2003
5	Kebumen	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	Anna Ratnawati, S.KM, M.Si	2008
6	Purworejo	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo	Aeng Mulatno, S.Sos	2016
7	Wonosobo	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo	Drs. Eko Yuwono	2016
8	Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Imam Basori, S.Sos, M.Si	2016
9	Boyolali	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali	Siti Askariyah, S.Sos, MM	2016
10	Klaten	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Syahrana, SH, CN	2001
11	Sukoharjo	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Drs. Santoso Ramelan, M.Si	2016
12	Wonogiri	Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri	Ir. Arso Utoro, MM	1996
13	Karanganyar	Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Bambang Harsono, S.E, M.M	1998
14	Sragen	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen	Drs. Parsono, M.M	2016
15	Grobogan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan	Drs. Muryanto, MM	2016
16	Blora	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora	Annur Rofiq, SE, M.Si	2017
17	Rembang	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang	H.Agus Salim, SH, MH	2016
18	Pati	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati	Suwanto, S.Pd, M.Pd	2001

19	Kudus	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus	Drs. Masyudi, M.M	2016
20	Jepara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara	Umar Chotob, SH., M.Si	2017
21	Demak	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak	Dra. Tatik Rumiati	2008
22	Semarang	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang	Dra. Hendy Lestari, M.M	2016
23	Temanggung	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung	Agus Munadi, S.Sos.,M.Si	2016
24	Kendal	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Ir. Diah Aning Budiarti, M.Si	1998
25	Batang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang	Rakhmat Nurul Fadilah, S.Pd., M.Si	2017
26	Pekalongan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan	Tutik Iriyanti, S.H.,M.Si	2001
27	Pemalang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Abdulatip, S.IP	
28	Brebes	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes	Drs. Tatag Koes Adianto, M.Si	1999
29	Tegal	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal	Drs. Abdul Apipudin, M.Si	2008
30	Kota Salatiga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga	Slamet Setyo Budi, S.E.,M.Acc	2016
31	Kota Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	Ir. Eri Widyo Saptoko, M.Si	2008
32	Kota Surakarta	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta	Dra. Sis Ismiyati, M.M	2008
33	Kota Semarang	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Bimbong Yogatama, S.H	
34	Kota Pekalongan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan	Erli Nufiati, S.E	2017
35	Kota Tegal	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal	Muhamad Afin, S.IP., M.Si	2016

## B. KELEMBAGAAN

Penyusunan Lembaga Kearsipan Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota tentunya memiliki standard baik berupa Peraturan Daerah maupun peraturan Bupati/Walikota sebagai acuan dalam menyusun tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. Berikut adalah data kelembagaan dari 35 LKD tersebut.

**Tabel 4. Data Kelembagaan**

No	Nama LKD	Kab/Kota	Struktur Organisasi	Dasar Pembentukan
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap	Cilacap	Ada	Perda Kabupaten Cilacap No.9 Tahun 2016 dan Perbup No.101 Tahun 2016
2	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Banyumas	Ada	Perda Nomor 16 Tahun 2016
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Purbalingga	Ada	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 32 Tahun 2005
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara	Ada	Perda No.24 Tahun 2003
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	Kebumen	Ada	Perda Nomor 14 Tahun 2008 dan Perbup No 80 Tahun 2018
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo	Purworejo	Ada	Perbup No.79 Tahun 2016
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	Ada	Peraturan Daerah No. 12/2016
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Magelang	Ada	Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2016
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali	Boyolali	Ada	Perda No.16 Tahun 2016
10	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Klaten	Ada	Perbup No.58 Tahun 2016
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo	Ada	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016
12	Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri	Wonogiri	Ada	Perda Nomor 13 Tahun 2016
13	Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Karanganyar	Ada	Perda No.4 Tahun 1998
14	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen	Sragen	Ada	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan	Grobogan	Ada	Perbup Nomor 66/2016
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora	Blora	Ada	Perda No.69 Tahun 2016
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang	Rembang	Ada	Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2016

18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati	Pati	Ada	Perda Nomor 41 Tahun 2007
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus	Kudus	Ada	Peraturan Bupati Kudus No.29 Tahun 2016
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara	Jepara	Ada	Perda Kab. Jepara No. 14 Tahun 2016
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak	Demak	Ada	Perda Kab. Demak No. 5 Tahun 2016
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang	Semarang	Ada	Perda Kab. Semarang No. 21 Tahun 2016
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung	Temanggung	Ada	Perda No. 10 Tahun 2016
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Kendal	Ada	Perda Kab. Kendal No. 4 Tahun 1998
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang	Batang	Ada	Perda Kab. Batang No. 8 Tahun 2016
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan	Pekalongan	Ada	Perda Kab. Pekalongan No. 4 Tahun 2016
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Pemalang	Ada	Perda Kab. Pemalang No 13. Tahun 2016
28	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes	Brebes	Ada	Perda No. 5 Tahun 2016
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal	Tegal	Ada	Perda No. 9 Tahun 2008
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga	Kota Salatiga	Ada	Perwali Kota Salatiga No. 35 Tahun 2016
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	Kota Magelang	Ada	Perda No. 3 Tahun 2016
32	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta	Kota Surakarta	Ada	Perwali No. 27 C Tahun 2016
33	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Kota Semarang	Ada	Perda No 14 tahun 2016
34	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	Ada	Perda Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016
35	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal	Kota Tegal	Ada	Perwali Kota Tegal No. 18 Tahun 2016

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada 35 LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah memiliki struktur organisasi yang lengkap dengan dasar hukum pembentukannya.

## C. KETATALAKSANAAN

Ketatalaksanaan pada bagian ini meliputi penerapan berbagai peraturan perundangan terkait pada LKD Kabupaten/Kota, khususnya yang berhubungan dengan Penerapan Arsip Berbasis teknologi Informasi.

### C.1. Kajian Per Indikator pada Variabel Ketatalaksanaan

1. Indikator Penerapan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik merupakan salah satu dasar hukum dalam pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi. Undang-Undang tersebut memberikan keabsahan secara hukum pada keberadaan arsip elektronik tersebut. Pada pasal 5 UU No 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

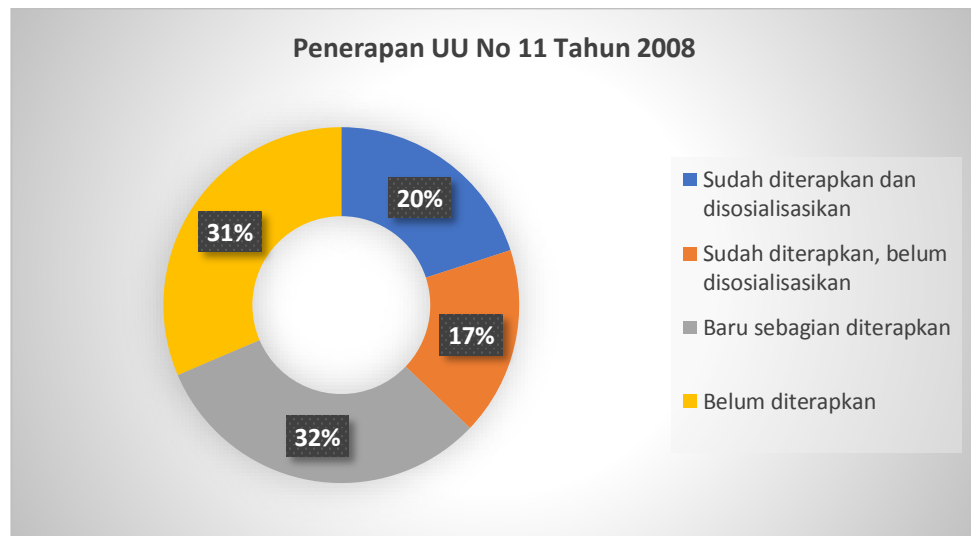
Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat penerapan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

**Tabel 5. Penerapan UU No 11 Tahun 2008 pada LKD Kab/Kota**

No	Penerapan UU No 11 Tahun 2008	Jumlah
1	Sudah diterapkan dan disosialisasikan	7
2	Sudah diterapkan, belum disosialisasikan	6
3	Baru sebagian diterapkan	11
4	Belum diterapkan	11
	Total	<b>35</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase penerapan UU No 11 Tahun 2008 tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 4. Tingkat Penerapan UU No 11 tahun 2008**

Berdasarkan kuesioner, terlihat bahwa hanya 20% LKD Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan, menerapkan dan bahkan mensosialisasikan UU No 11 Tahun 2008 tersebut, sedangkan 17% sudah melaksanakan, tetapi belum mensosialisasikannya. Selanjutnya, terdapat 31% LKD bahkan belum menerapkannya sama sekali dan sisanya sudah menerapkan walaupun hanya sebagian.

2. Penerapan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan salah satu dasar hukum dalam pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 ini menegaskan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi: (a) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; (b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; (c) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau (d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Informasi yang

dimaksud adalah berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

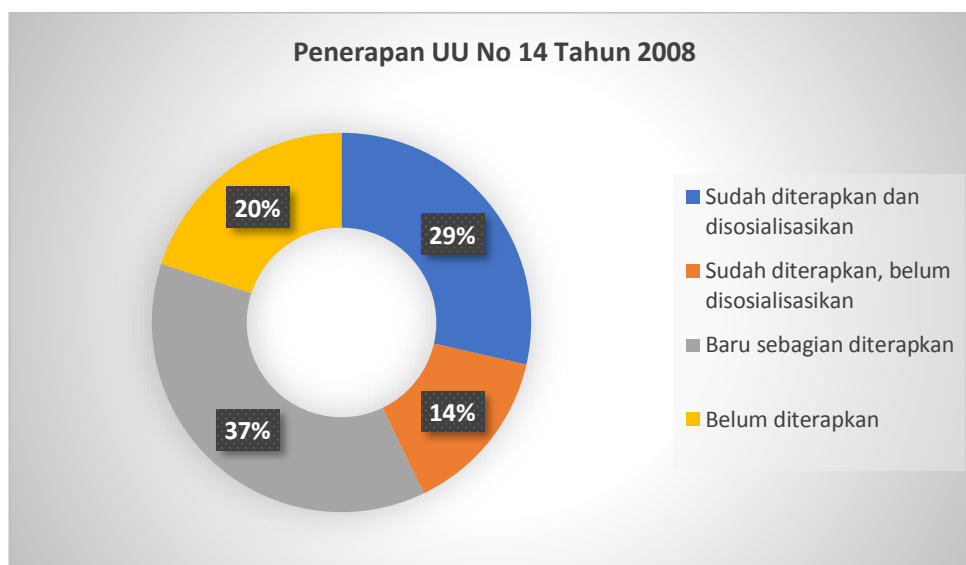
Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat penerapan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

**Tabel 6. Penerapan UU No 14 Tahun 2008 pada LKD Kab/Kota**

No	Penerapan UU No 14 Tahun 2008	Jumlah
1	Sudah diterapkan dan disosialisasikan	10
2	Sudah diterapkan, belum disosialisasikan	5
3	Baru sebagian diterapkan	13
4	Belum diterapkan	7
	Total	<b>35</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase penerapan UU No 14 Tahun 2008 tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 5. Tingkat Penerapan UU No 14 tahun 2008**

Berdasarkan kuesioner, terlihat terdapat 29% LKD Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan, menerapkan dan bahkan mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 tersebut, sedangkan 14% sudah melaksanakan, tetapi belum mensosialisasikannya. Lebih lanjut, 37% LKD sudah menerapkan sebagian dan sisanya belum menerapkan sama sekali.

### 3. Penerapan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Penerapan arsip secara elektronik juga sudah didukung Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, khususnya pasal 68 dimana pencipta arsip dan atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan atau media yang lainnya. Ketentuan mengenai autentisitas arsip yang tercipta secara elektronik dan atau hasil alih media sebagaimana dimaksud harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

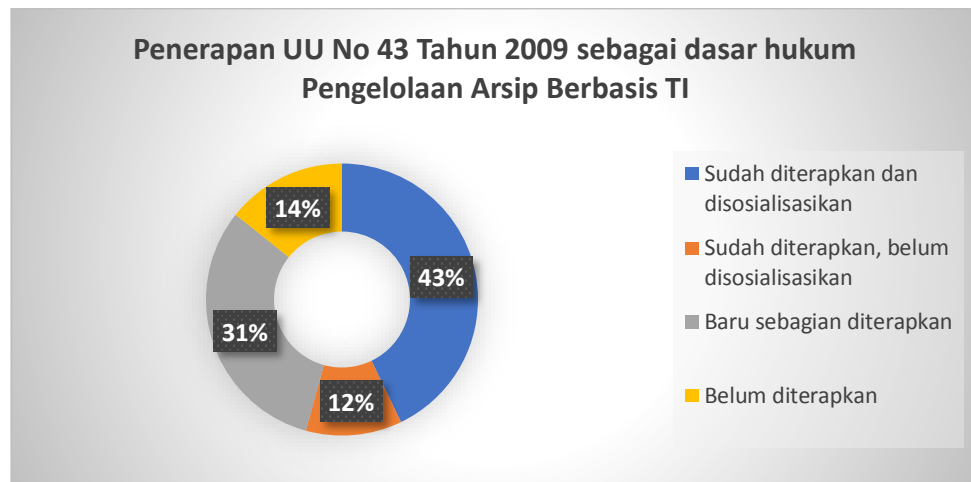
Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat penerapan Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan tersebut.

**Tabel 7. Penerapan UU No 43 Tahun 2009 pada LKD Kab/Kota**

No	Penerapan UU No 43 Tahun 2009	Jumlah
1	Sudah diterapkan dan disosialisasikan	15
2	Sudah diterapkan, belum disosialisasikan	4
3	Baru sebagian diterapkan	11
4	Belum diterapkan	5
	Total	<b>35</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase penerapan UU No 43 Tahun 2009 tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 6. Tingkat Penerapan UU No 43 tahun 2009**

Berdasarkan kuesioner, terlihat terdapat 43% LKD Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan, menerapkan dan bahkan mensosialisasikan UU No 43 Tahun 2009 tersebut, sedangkan 12% sudah melaksanakan, tetapi belum mensosialisasikannya. Kemudian, 31% LKD sudah menerapkan sebagian dan sisanya belum menerapkan sama sekali.

4. Penerapan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

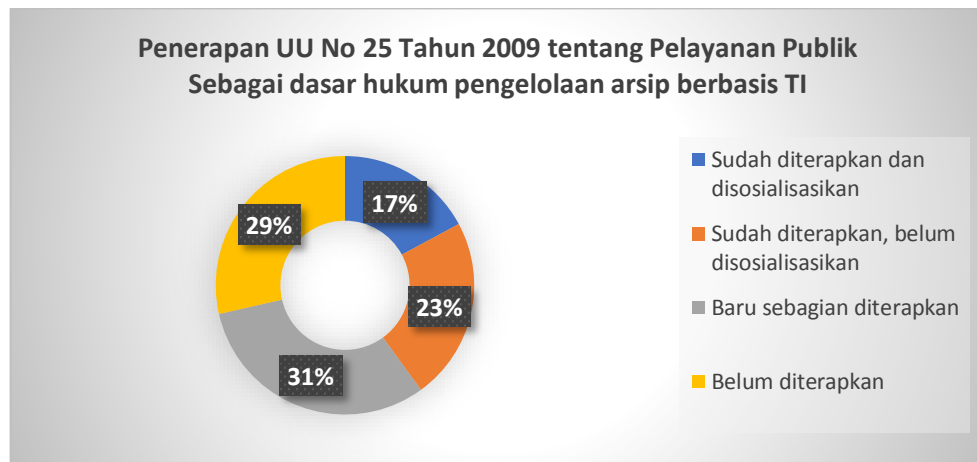
Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat penerapan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut.

**Tabel 8. Penerapan UU No 25 Tahun 2009 pada LKD Kab/Kota**

No	Penerapan UU No 25 Tahun 2009	Jumlah
1	Sudah diterapkan dan disosialisasikan	6
2	Sudah diterapkan, belum disosialisasikan	8
3	Baru sebagian diterapkan	11
4	Belum diterapkan	10
	Total	<b>35</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase penerapan UU No 25 Tahun 2009 tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 7. Tingkat Penerapan UU No 25 tahun 2009**

Jadi berdasarkan kuesioner, baru terdapat 17% LKD Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan, menerapkan dan bahkan mensosialisasikan UU No 25 Tahun 2009 tersebut, sedangkan 23% sudah menerapkan, tetapi belum mensosialisasikannya. Selanjutnya, sebanyak 31% LKD sudah menerapkan sebagian dan sisanya belum menerapkan sama sekali.

- Penerapan PP No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat penerapan PP No 28 Tahun 2012 tersebut.

**Tabel 9. Penerapan PP No 28 Tahun 2012 pada LKD Kab/Kota**

No	Penerapan PP No 28 Tahun 2012	Jumlah
1	Sudah diterapkan dan disosialisasikan	14
2	Sudah diterapkan, belum disosialisasikan	4
3	Baru sebagian diterapkan	11
4	Belum diterapkan	5
5	Tidak Menjawab	1
	Total	<b>35</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase penerapan PP No 28 Tahun 2012 tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

### **Gambar 8. Tingkat Penerapan PP No 28 Tahun 2012**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 40% LKD Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan, menerapkan dan bahkan mensosialisasikan PP No 28 Tahun 2012 tersebut, sedangkan 12% sudah menerapkan, tetapi belum mensosialisasikannya. Sebanyak 31% LKD sudah menerapkan sebagian, 14% belum menerapkan dan 3% tidak menjawab kuesioner yang diberikan.

6. Ketersediaan Regulasi tingkat daerah tentang penyelenggaraan kearsipan sebagai dasar hukum pengelolaan arsip berbasis TI.

Keberadaan regulasi tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten/Kota tentu menjadi salah satu tolok ukur kualitas pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kearsipan. Hal tersebut karena keberadaan pedoman kearsipan dapat mempersempit kesalahan dalam operasional kegiatan bidang kearsipan.

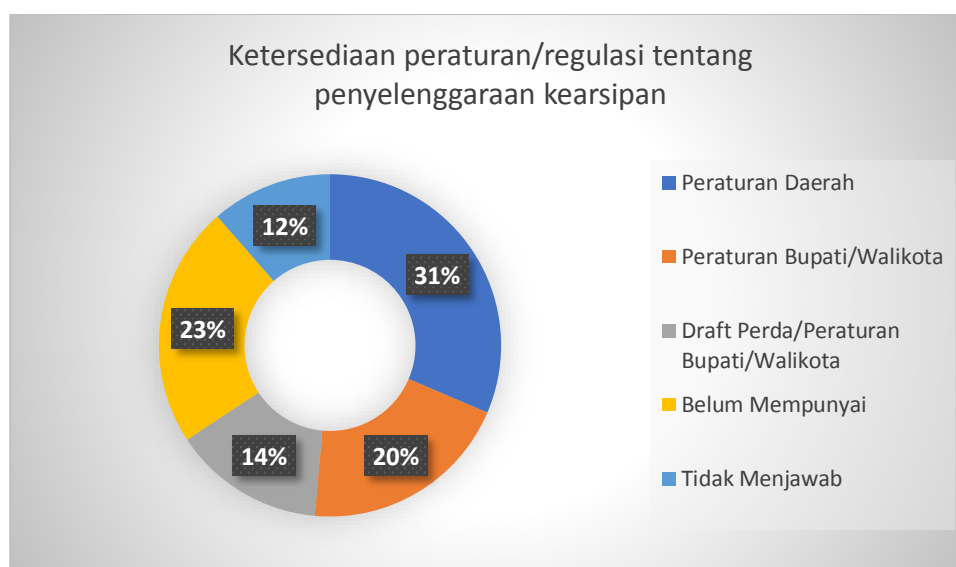
Tabel di bawah ini menunjukkan ketersediaan regulasi/peraturan tentang penyelenggaraan kearsipan sebagai dasar hukum pengelolaan arsip berbasis TI.

**Tabel 10. Keberadaan Peraturan di tingkat Kab/Kota**

No	Keberadaan Peraturan	Jumlah
1	Peraturan Daerah	11
2	Peraturan Bupati/Walikota	7
3	Draft Perda/Peraturan Bupati/Walikota	5
4	Belum Mempunyai	8
5	Tidak Menjawab	4
	Total	<b>35</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase ketersediaan regulasi/peraturan tentang penyelenggaraan kearsipan sebagai dasar hukum pengelolaan arsip berbasis TI tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 9. Ketersediaan regulasi penyelenggaraan kearsipan**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 31% LKD Kabupaten/Kota sudah memiliki peraturan dalam bentuk Perda, 20% dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, 14% masih berupa draft, 23% belum mempunyai dan 12% tidak menjawab kuesioner yang diberikan.

7. Penerapan Regulasi tingkat daerah tentang penyelenggaraan kearsipan.

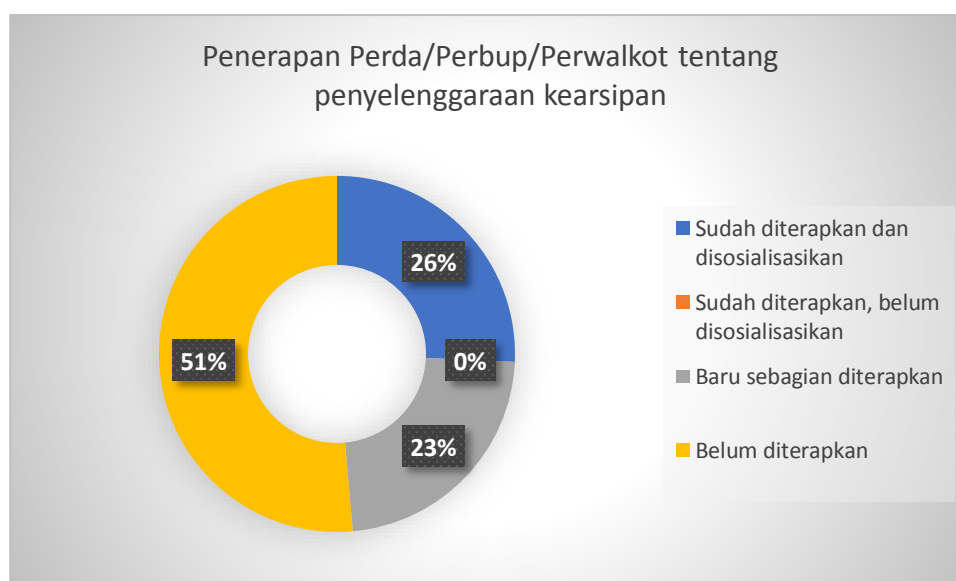
Tabel di bawah ini menunjukkan penerapan regulasi/peraturan tingkat daerah tentang penyelenggaraan kearsipan sebagai dasar hukum pengelolaan arsip berbasis TI.

**Tabel 11. Penerapan Peraturan Kearsipan di tingkat Kab/Kota**

No	Penerapan Peraturan	Jumlah
1	Sudah diterapkan dan disosialisasikan	9
2	Sudah diterapkan, belum disosialisasikan	0
3	Baru sebagian diterapkan	8
4	Belum diterapkan	18
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase penerapan regulasi/peraturan tentang penyelenggaraan kearsipan sebagai dasar hukum pengelolaan arsip berbasis TI tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 10. Penerapan regulasi penyelenggaraan kearsipan**

Jadi berdasarkan kuesioner, baru terdapat 26% LKD Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan peraturan di tingkat daerah, 23% baru menerapkan sebagian, dan 51% belum menerapkannya.

8. Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 17 Tahun 2011 tentang Pedoman SKKAD.

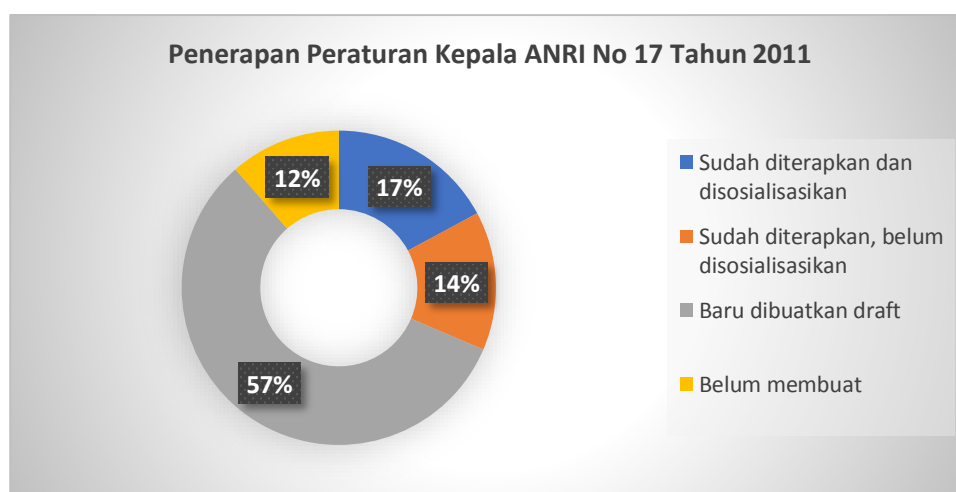
Tabel di bawah ini menunjukkan penerapan Peraturan Kepala ANRI No 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) sebagai dasar hukum dalam mengakses arsip berbasis TI.

**Tabel 12. Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 17 Tahun 2011**

No	Penerapan Peraturan	Jumlah
1	Sudah diterapkan dan disosialisasikan	6
2	Sudah diterapkan, belum disosialisasikan	5
3	Baru sebagian diterapkan	20
4	Belum diterapkan	4
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase penerapan regulasi/peraturan tentang penyelenggaraan kearsipan sebagai dasar hukum pengelolaan arsip berbasis TI tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 11. Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 17 Tahun 2011**

Berdasarkan kuesioner, baru terdapat 17% LKD Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan dan mensosialisasikan Peraturan Kepala ANRI No 17 Tahun 2011, 14% baru menerapkan tetapi belum mensosialisasikan, 57% masih membuat draft dan 12% belum menerapkannya.

9. Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik.

Tabel di bawah ini menunjukkan penerapan Peraturan Kepala ANRI No 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan

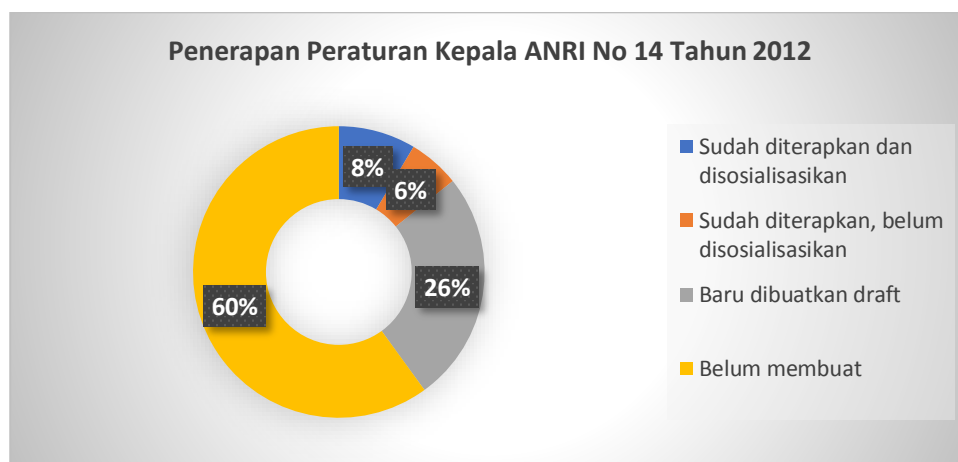
Umum Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai dasar penyusunan pedoman pengelolaan arsip berbasis TI.

**Tabel 13. Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 14 Tahun 2012**

No	Penerapan Peraturan	Jumlah
1	Sudah diterapkan dan disosialisasikan	3
2	Sudah diterapkan, belum disosialisasikan	2
3	Baru sebagian diterapkan	9
4	Belum diterapkan	21
	Total	<b>35</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase penerapan peraturan Kepala ANRI No 14 Tahun 2012 tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 12. Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 14 Tahun 2012**

Berdasarkan kuesioner, hanya terdapat 8% LKD Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan dan mensosialisasikan peraturan Peraturan Kepala ANRI No 14 Tahun 2012, 6% baru menerapkan tetapi belum mensosialisasikan, 26% masih membuat draft dan 60% belum menerapkannya.

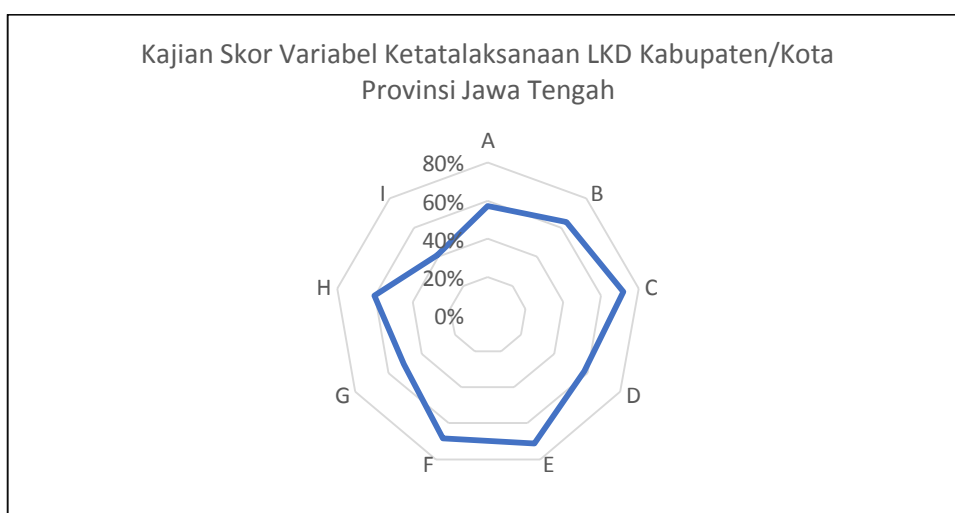
Dari pembahasan 9 indikator di atas, maka untuk variabel ketatalaksanaan dapat diperoleh skor seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 14. Skor Variabel Ketatalaksanaan LKD Kab/Kota Provinsi Jateng**

Point	Indikator	Skor	Grade
A	Penerapan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	2.26	Cukup
B	Penerapan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	2.51	Baik
C	Penerapan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	2.83	Baik
D	Penerapan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	2.29	Cukup
E	Penerapan PP No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.	2.79	Baik
F	Ketersediaan Regulasi tingkat daerah tentang penyelenggaraan kearsipan.	2.68	Baik
G	Penerapan Regulasi tingkat daerah tentang penyelenggaraan kearsipan.	2.00	Cukup
H	Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.	2.37	Cukup
I	Penerapan Peraturan Kepala ANRI No 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik	1.63	Kurang
	<b>Rata-Rata</b>	<b>2.37</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya dapat juga dilihat dalam grafik radar pada gambar di bawah ini.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 13. Skor Ketatalaksanaan LKD Kab/Kota se Jawa Tengah**

Dari grafik radar di atas dapat diketahui bahwa dari 9 indikator pada variabel ketatalaksanaan, yang paling lemah adalah pada indikator (I) yaitu: penerapan Peraturan Kepala ANRI No 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai dasar penyusunan pedoman pengelolaan arsip berbasis TI.

## C.2. Kondisi Ketatalaksanaan Per LKD Kabupaten/Kota

Kondisi ketatalaksanaan pada setiap Lembaga Kearsipan Daerah pada Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 15. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 4 LKD Kabupaten/Kota dengan kategori ketatalaksanaannya sangat baik, 7 LKD yang ketatalaksanaannya Baik, 16 LKD yang ketatalaksanaannya Cukup dan sisanya 8 LKD memiliki ketatalaksanaan yang Kurang Baik.

**Tabel 15. Skor Variabel Ketatalaksanaan per LKD Kab/Kota**

No	Kabupaten	Skor	Kategori
1	Kab. Pati	4.00	Sangat Baik
2	Kab. Purbalingga	3.78	Sangat Baik
3	Kota Salatiga	3.78	Sangat Baik
4	Kota Magelang	3.78	Sangat Baik
5	Kab. Purworejo	3.22	Baik
6	Kab. Kudus	3.22	Baik
7	Kab. Jepara	3.22	Baik
8	Kab. Kebumen	3.00	Baik
9	Kota Tegal	3.00	Baik
10	Kab. Boyolali	2.89	Baik
11	Kab. Kendal	2.56	Baik
12	Kab. Wonosobo	2.44	Cukup
13	Kota Semarang	2.44	Cukup
14	Kab. Karanganyar	2.33	Cukup
15	Kab. Semarang	2.33	Cukup
16	Kab. Cilacap	2.22	Cukup
17	Kab. Klaten	2.22	Cukup
18	Kab. Sragen	2.22	Cukup
19	Kab. Demak	2.22	Cukup
20	Kab. Batang	2.22	Cukup
21	Kab. Brebes	2.22	Cukup
22	Kota Surakarta	2.22	Cukup
23	Kab. Grobogan	2.13	Cukup
24	Kab. Pekalongan	2.11	Cukup
25	Kota Pekalongan	2.11	Cukup

26	Kab. Rembang	2.00	Cukup
27	Kab. Temanggung	2.00	Cukup
28	Kab. Banjarnegara	1.67	Kurang Baik
29	Kab. Sukoharjo	1.67	Kurang Baik
30	Kab. Pemalang	1.44	Kurang Baik
31	Kab. Blora	1.25	Kurang Baik
32	Kab. Magelang	1.22	Kurang Baik
33	Kab. Banyumas	1.13	Kurang Baik
34	Kab. Wonogiri	1.13	Kurang Baik
35	Kab. Tegal	1.00	Kurang Baik
	<b>Skor rata-rata</b>	<b>2.35</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

## D. SISTEM/APLIKASI KEARSIPAN

Variabel Sistem/Aplikasi kearsipan akan melihat kesiapan LKD dalam penerapan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi dari sisi ketersediaan dan penggunaan sistem atau aplikasi kearsipan elektronik.

### D.1. Kajian per Indikator pada Variabel Aplikasi Kearsipan

#### 1. Keanggotaan Jaringan SIKN/JIKN.

**Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)** adalah sistem informasi kearsipan yang dibangun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai upaya pengembangan e-government dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. SIKN merupakan aplikasi antar-muka yang dapat digunakan oleh Simpul Jaringan untuk memasukkan informasi kearsipan miliknya untuk selanjutnya dipublikasikan pada *website* Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Disamping itu, aplikasi ini dapat juga digunakan oleh Simpul Jaringan untuk mengolah informasi kearsipan yang dimiliki dalam rangka membantu temu balik baik dalam format digital maupun lokasi fisik arsip di tempat penyimpanannya. Pencarian informasi kearsipan dapat dilakukan dengan berbagai kategori, meliputi: deskripsi arsip, pencipta arsip, fungsi, repositori (tempat penyimpanan), subjek, tempat, serta objek digitalnya. Di samping itu, aplikasi ini memungkinkan juga instansi mengetahui arsip mana yang paling sering diakses oleh pengguna.

Selanjutnya **Jaringan Informasi Kearsipan Nasional** atau JIKN merupakan portal web yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi kearsipan yang dikelola oleh lembaga kearsipan nasional, lembaga kearsipan daerah, lembaga kearsipan perguruan tinggi, serta lembaga dan kementerian di pusat maupun daerah. Informasi kearsipan yang tersedia adalah informasi yang bersifat terbuka yang berasal dari khazanah arsip statis dan arsip dinamis. Keberadaan Portal JIKN yang merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (*e-government*) dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (*open government*). Di samping itu, penyelenggaraan JIKN yang berhasil baik akan menjadi bukti eksistensi kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

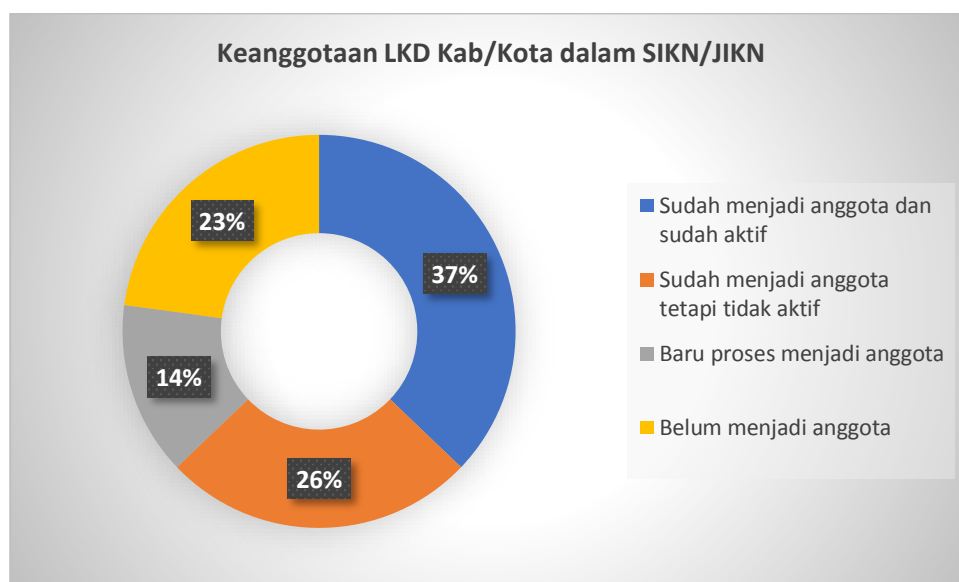
Berdasarkan data kuesioner yang masuk, maka berikut adalah data-data keanggotaan LKD Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah ke dalam SIKN/JIKN tersebut.

**Table 16. Keikutsertaan dalam SIKN/JIKN**

No	Penerapan Peraturan	Jumlah
1	Sudah menjadi anggota dan sudah aktif	13
2	Sudah menjadi anggota tetapi tidak aktif	9
3	Baru proses menjadi anggota	5
4	Belum menjadi anggota	8
	Total	<b>35</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase keikutsertaan LKD Kabupaten/Kota dalam SIKN/JIKN tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 14. Keanggotaan dalam SIKN/JIKN**

Berdasarkan kuesioner, baru terdapat 37% LKD Kabupaten/Kota yang sudah menjadi anggota dan aktif, 23% sudah menjadi anggota tetapi tidak aktif, 14% baru proses menjadi anggota dan 23% belum menjadi anggota.

## 2. Pemanfaatan SIKD dari ANRI.

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) merupakan software sistem pengelolaan manajemen kearsipan secara elektronik yang dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). SIKD ini merupakan langkah ANRI sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan tertib arsip di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia. Aplikasi SIKD ini dibuat berdasarkan peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 15 Tahun 2015 tentang aplikasi SIKD dan SIKS yang sejalan dengan program pemerintah yang menghendaki proses surat menyurat di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga lebih cepat, aman dan sesuai dengan prosedur.

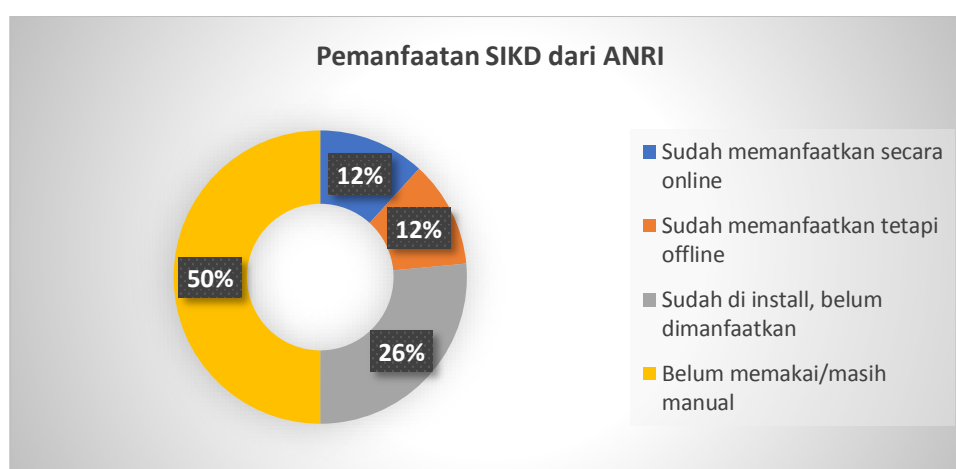
Berdasarkan data kuesioner yang masuk, maka berikut adalah data-data pemanfaatan SIKD dari ANRI pada LKD kabupaten/kota di Jawa Tengah.

**Tabel 17. Pemanfaatan SIKD dari ANRI**

No	Pemanfaatan SIKD dari ANRI	Jumlah
1	Sudah memanfaatkan secara online	4
2	Sudah memanfaatkan tetapi offline	4
3	Sudah di install, belum dimanfaatkan	9
4	Belum memakai/masih manual	17
5	Tidak menjawab	1
	Total	<b>35</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase pemanfaatan SIKD pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 15. Pemanfaatan SIKD dari ANRI**

Berdasarkan kuesioner, baru terdapat 12% LKD Kabupaten/Kota yang sudah memanfaatkan SIKD dari ANRI secara *online*, 12% sudah memanfaatkan tetapi *offline*, 26% baru melakukan instalasi tetapi belum memanfaatkan, 50% belum memanfaatkan atau masih manual dan 3% tidak menjawab.

### 3. Pemanfaatan SIKD selain dari ANRI.

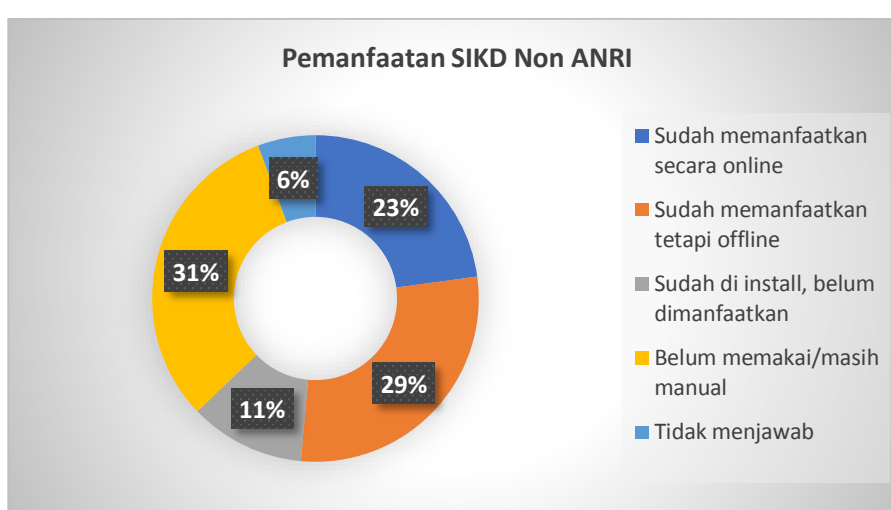
Beberapa LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menerapkan SIKD yang bukan dari ANRI. Hal ini dapat dilihat pada tabel 18 di bawah.

**Tabel 18. Pemanfaatan SIKD selain dari ANRI**

No	Pemanfaatan SIKD selain dari ANRI	Jumlah
1	Memanfaatkan secara online	8
2	Memanfaatkan tetapi offline	10
3	Sudah di install, belum dimanfaatkan	4
4	Belum memakai/masih manual	11
5	Tidak menjawab	2
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase pemanfaatan SIKD di luar ANRI.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 16. Pemanfaatan SIKD diluar ANRI**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 23% LKD Kabupaten/Kota yang memanfaatkan SIKD non ANRI secara *online*, 29% sudah memanfaatkan tetapi *offline*, 11% sudah di-instal tetapi belum memanfaatkan, 31% belum memanfaatkan atau masih manual dan 6% tidak menjawab.

#### 4. Pemanfaatan SIKS dari ANRI.

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) merupakan aplikasi yang dikembangkan ANRI untuk membantu menangani pengelolaan arsip statis di lingkungan lembaga kearsipan serta menyajikannya untuk dapat diakses oleh masyarakat. Arsip statis sendiri merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena

memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

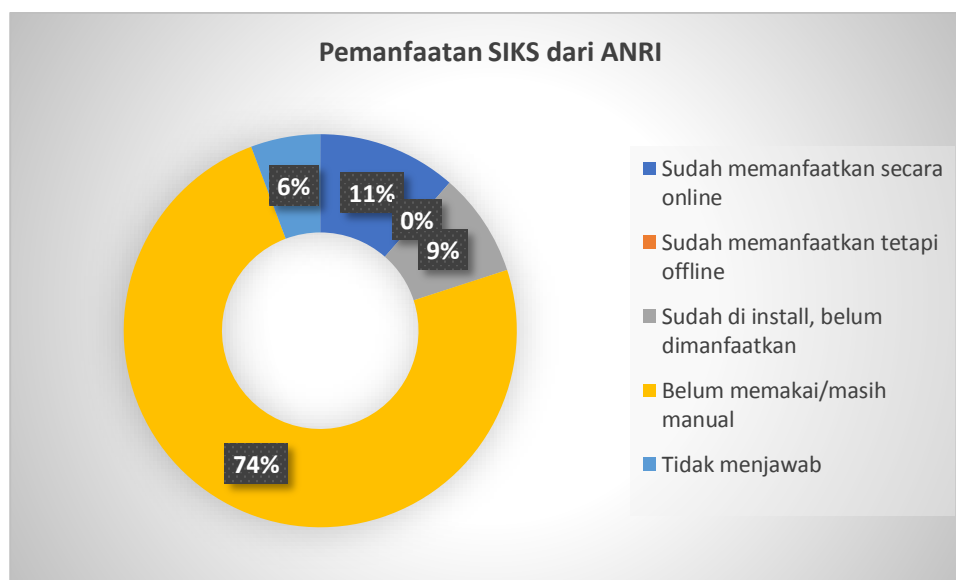
Berdasarkan data kuesioner yang masuk, maka berikut adalah data-data pemanfaatan SIKS dari ANRI pada LKD kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 19. Pemanfaatan SIKS dari ANRI**

No	Pemanfaatan SIKS dari ANRI	Jumlah
1	Sudah memanfaatkan secara online	4
2	Sudah memanfaatkan tetapi offline	0
3	Sudah di install, belum dimanfaatkan	3
4	Belum memakai/masih manual	26
5	Tidak menjawab	2
	Total	<b>35</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase pemanfaatan SIKS pada LKD Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 17. Pemanfaatan SIKS dari ANRI**

Berdasarkan kuesioner, baru terdapat 11% LKD Kabupaten/Kota yang sudah memanfaatkan SIKS dari ANRI secara *online*, 9% baru melakukan instalasi tetapi belum memanfaatkan, 74% belum memanfaatkan atau masih manual dan 6% tidak menjawab.

5. Pemanfaatan SIKS selain dari ANRI.

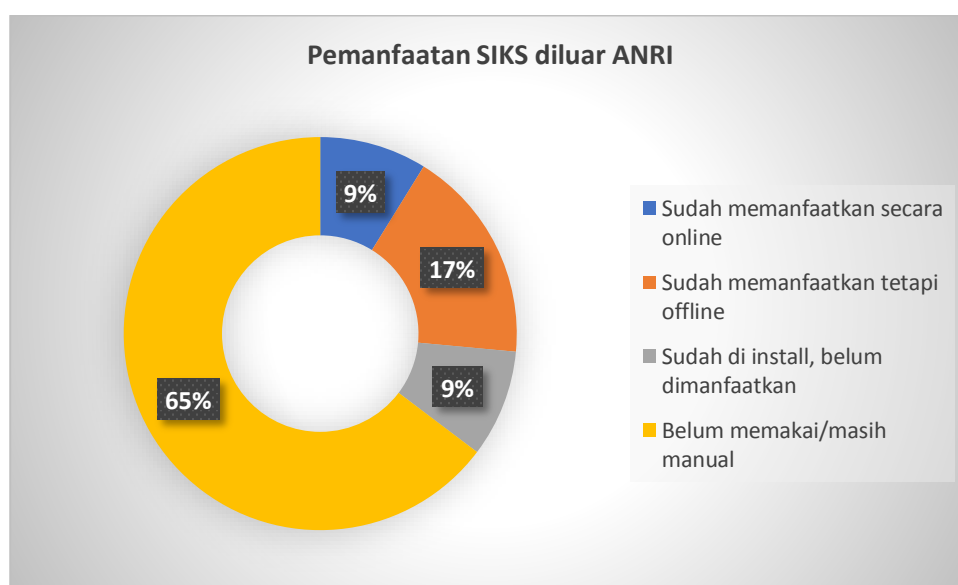
Beberapa LKD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menerapkan SIKS yang bukan dari ANRI. Berdasarkan data kuesioner yang masuk, maka berikut adalah data-data pemanfaatan SIKS yang bukan dari ANRI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 20. Pemanfaatan SIKS diluar ANRI**

No	Pemanfaatan SIKS diluar ANRI	Jumlah
1	Memanfaatkan secara online	3
2	Memanfaatkan tetapi offline	6
3	Sudah di install, belum dimanfaatkan	3
4	Belum memakai/masih manual	22
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase pemanfaatan SIKS di luar ANRI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 18. Pemanfaatan SIKS diluar ANRI**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 9% LKD Kabupaten/Kota yang memanfaatkan SIKS non ANRI secara *online*, 17% sudah memanfaatkan tetapi *offline*, 9% sudah instalasi tetapi belum memanfaatkan, dan sebagian besar atau 65% belum memanfaatkan atau masih mengerjakan secara manual.

## D.2. Kondisi Sistem/Aplikasi per LKD Kabupaten/Kota

Kondisi Sistem/Aplikasi kearsipan elektronik pada setiap Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat seperti pada tabel 21 di bawah ini.

**Tabel 21. Skor Variabel Ketatalaksanaan per LKD Kab/Kota**

No	Kabupaten	Skor	Kategori
1	Kab. Rembang	3.83	Sangat Baik
2	Kab. Purbalingga	3.67	Sangat Baik
3	Kab. Kebumen	3.25	Baik
4	Kota Semarang	3.00	Baik
5	Kab. Wonosobo	2.67	Baik
6	Kab. Purworejo	2.50	Cukup
7	Kab. Boyolali	2.50	Cukup
8	Kab. Kudus	2.50	Cukup
9	Kab. Pekalongan	2.33	Cukup
10	Kota Salatiga	2.33	Cukup
11	Kab. Grobogan	2.17	Cukup
12	Kab. Pati	2.17	Cukup
13	Kota Surakarta	2.17	Cukup
14	Kab. Magelang	2.00	Cukup
15	Kab. Klaten	2.00	Cukup
16	Kab. Sukoharjo	2.00	Cukup
17	Kab. Blora	2.00	Cukup
18	Kab. Jepara	2.00	Cukup
19	Kab. Tegal	2.00	Cukup
20	Kota Tegal	2.00	Cukup
21	Kab. Karanganyar	1.83	Cukup
22	Kab. Demak	1.83	Cukup
23	Kab. Batang	1.83	Cukup
24	Kota Magelang	1.83	Cukup
25	Kab. Semarang	1.67	Kurang Baik
26	Kab. Sragen	1.50	Kurang Baik
27	Kab. Kendal	1.50	Kurang Baik
28	Kab. Brebes	1.50	Kurang Baik
29	Kota Pekalongan	1.50	Kurang Baik
30	Kab. Cilacap	1.17	Kurang Baik
31	Kab. Banyumas	1.17	Kurang Baik
32	Kab. Pemasang	1.17	Kurang Baik
33	Kab. Banjarnegara	1.00	Kurang Baik
34	Kab. Wonogiri	1.00	Kurang Baik
35	Kab. Temanggung	1.00	Kurang Baik
	<b>Skor rata-rata</b>	<b>2.02</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 LKD Kabupaten/Kota yang kondisi penggunaan Sistem/Aplikasi kearsipan elektroniknya sangat baik, 3 LKD yang kondisi sistemnya dalam kategori Baik, 19 LKD yang kondisi sistemnya dalam kategori Cukup dan sisanya 11 dalam kondisi yang Kurang Baik.

## E. SARANA PRASARANA

Variabel Sarana/Prasarana meliputi ketersediaan *software* SIKD/SIKS dari ANRI, ketersediaan *software* SIKD/SIKS selain ANRI, ketersediaan domain dan ketersediaan perangkat keras.

### E.1. Kajian per Indikator pada Variabel Sarana Prasarana

#### 1. Ketersediaan *Software* SIKD/SIKS dari ANRI.

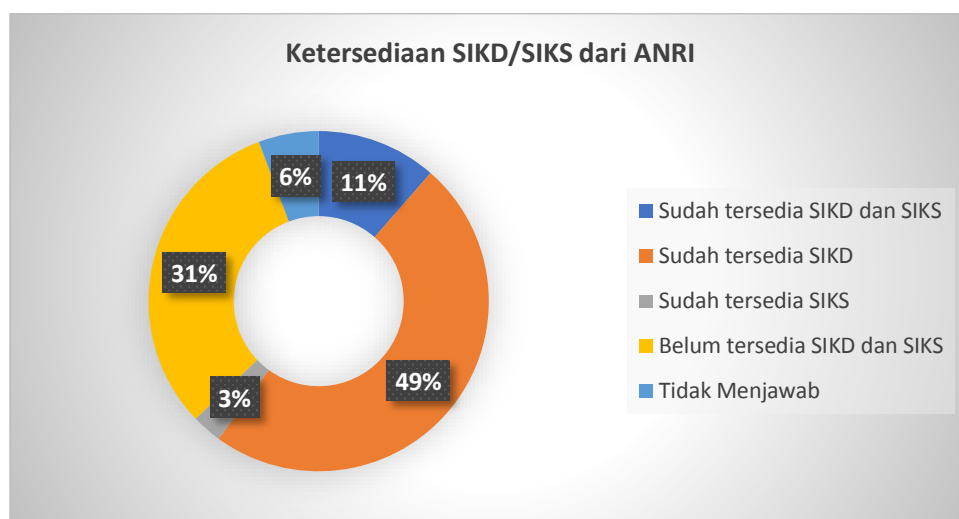
Ketersediaan *Software* SIKD/SIKS merupakan faktor utama kesiapan pelaksanaan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi. Berikut adalah *resume* ketersediaan *Software* SIKD/SIKS dari ANRI untuk LKD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 22. Ketersediaan Software SIKD/SIKS ANRI**

No	Ketersediaan Software	Jumlah
1	Sudah tersedia SIKD dan SIKS	4
2	Sudah tersedia SIKD	17
3	Sudah tersedia SIKS	1
4	Belum tersedia SIKD dan SIKS	11
5	Tidak Menjawab	2
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase ketersediaan SIKD/SIKS ANRI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 19. Ketersediaan *software* SIKD/SIKS dari ANRI**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 11% LKD Kabupaten/Kota yang sudah memiliki ketersediaan SIKD/SIKS ANRI, 49% hanya memiliki SIKD saja, 3% hanya memiliki SIKS, dan 31% belum memiliki baik SIKD maupun SIKS dari ANRI.

2. Ketersediaan *Software* SIKD/SIKS selain dari ANRI.

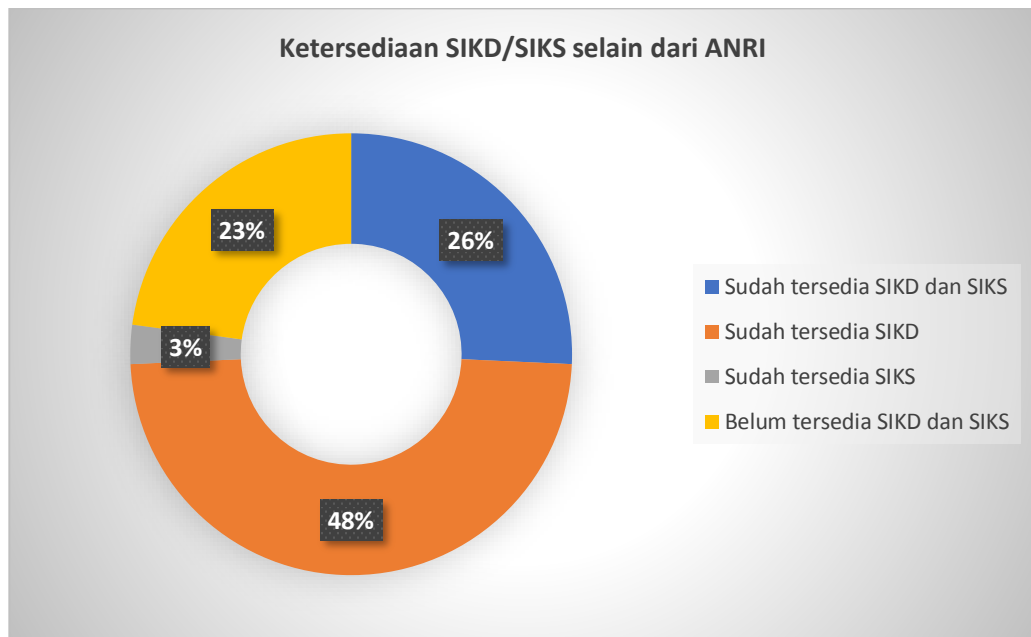
Berikut adalah *resume* ketersediaan *Software* SIKD/SIKS selain dari ANRI untuk LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 23. Ketersediaan *Software* SIKD/SIKS selain dari ANRI**

No	Ketersediaan <i>Software</i> selain dari ANRI	Jumlah
1	Sudah tersedia SIKD dan SIKS	9
2	Sudah tersedia SIKD	17
3	Sudah tersedia SIKS	1
4	Belum tersedia SIKD dan SIKS	8
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase ketersediaan SIKD/SIKS ANRI pada LKD Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah tersebut.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 20. Ketersediaan *software* SIKD/SIKS di luar ANRI**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 26% LKD Kabupaten/Kota yang memiliki ketersediaan SIKD/SIKS selain dari ANRI, 48% hanya memiliki SIKD saja, 3% hanya memiliki SIKS, dan 23% belum memiliki baik SIKD maupun SIKS yang selain dari ANRI.

### 3. Ketersediaan Sub Domain untuk SIKD/SIKS dari ANRI.

Domain adalah sebuah nama unik yang diberikan pada *server/IP address*, supaya *server/IP address* tersebut dapat diidentifikasi oleh jaringan internet dan dapat diakses secara *online*. Salah satu fungsi domain yaitu untuk mempermudah pengguna jaringan komputer atau internet saat mengakses aplikasinya, serta memudahkan pengguna mengingat nama server yang diaksesnya dan tidak perlu mengingat angka *IP address server* yang sebenarnya.

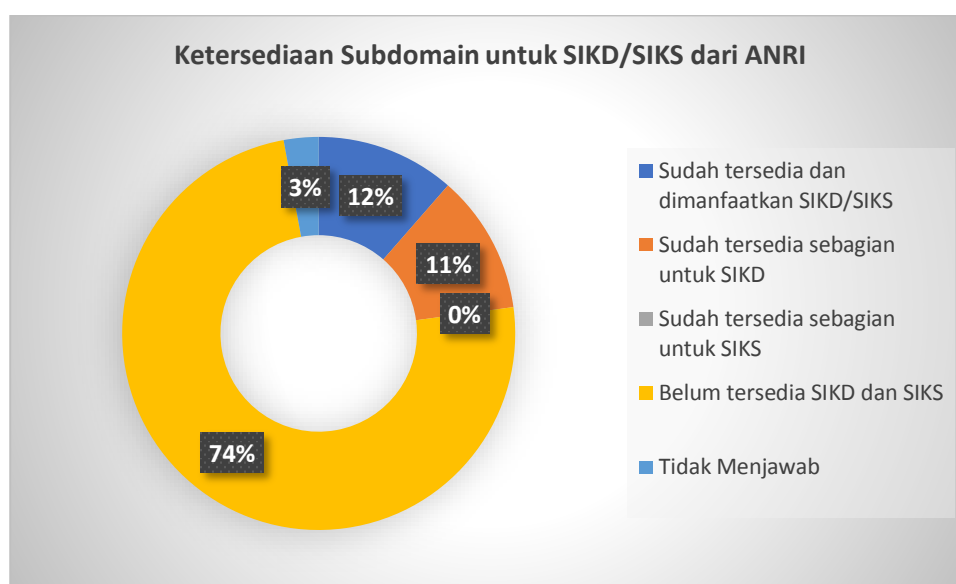
Berikut adalah *resume* ketersediaan sub domain untuk aplikasi SIKD/SIKS yang dari ANRI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 24. Ketersediaan Sub domain untuk SIKD/SIKS ANRI**

No	Ketersediaan Subdomain	Jumlah
1	Sudah tersedia dan dimanfaatkan SIKD/SIKS	4
2	Sudah tersedia sebagian untuk SIKD	4
3	Sudah tersedia sebagian untuk SIKS	0
4	Belum tersedia SIKD dan SIKS	26
5	Tidak Menjawab	1
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan ketersediaan sub domain untuk aplikasi SIKD/SIKS dari ANRI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 21. Ketersediaan Subdomain untuk SIKD/SIKS ANRI**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 12% LKD Kabupaten/Kota yang sudah memiliki ketersediaan sub domain dan sudah dimanfaatkan untuk SIKD/SIKS ANRI, 11% hanya tersedia sub domain untuk SIKD, dan 74% belum memiliki sub domain baik SIKD maupun SIKS dari ANRI, sementara 3% responden tidak menjawab.

4. Ketersediaan Sub Domain untuk SIKD/SIKS selain dari ANRI.

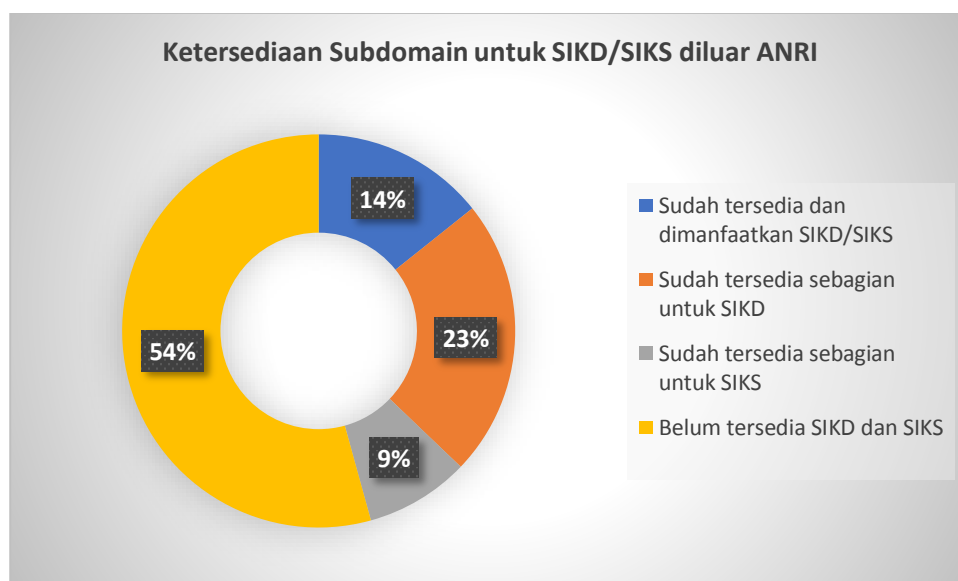
Berikut adalah *resume* ketersediaan sub domain untuk aplikasi SIKD/SIKS selain dari ANRI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 25. Ketersediaan Sub domain untuk SIKD/SIKS Selain ANRI**

No	Ketersediaan Subdomain	Jumlah
1	Sudah tersedia dan dimanfaatkan SIKD/SIKS	5
2	Sudah tersedia sebagian untuk SIKD	8
3	Sudah tersedia sebagian untuk SIKS	3
4	Belum tersedia SIKD dan SIKS	19
	Jumlah	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan ketersediaan sub domain untuk aplikasi SIKD/SIKS yang selain dari ANRI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 22. Ketersediaan Subdomain untuk SIKD/SIKS di luar ANRI**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 14% LKD Kabupaten/Kota yang sudah memiliki ketersediaan sub domain dan sudah dimanfaatkan untuk SIKD/SIKS ANRI, 23% hanya tersedia sub domain untuk SIKD, 9% hanya tersedia sub domain untuk SIKS, dan 54% belum memiliki sub domain baik SIKD maupun SIKS dari ANRI.

5. Ketersediaan Perangkat Keras untuk SIKD/SIKS ANRI.

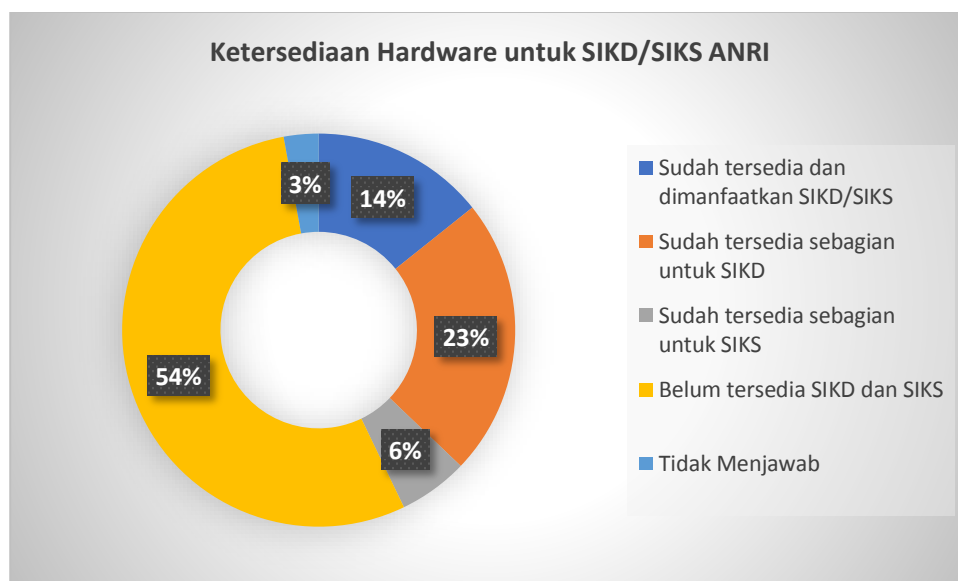
Perangkat keras yang dimaksud pada bagian ini adalah *hardware* untuk kebutuhan pemasangan aplikasi SIKD/SIKS baik berupa *server*, PC maupun *printer* dan *scanner*. Berikut adalah resume ketersediaan perangkat keras untuk aplikasi SIKD/SIKS dari ANRI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 26. Ketersediaan Perangkat Keras untuk SIKD/SIKS ANRI**

No	Ketersediaan perangkat keras	Jumlah
1	Sudah tersedia dan dimanfaatkan SIKD/SIKS	5
2	Sudah tersedia sebagian untuk SIKD	8
3	Sudah tersedia sebagian untuk SIKS	2
4	Belum tersedia SIKD dan SIKS	19
5	Tidak menjawab	1
	Jumlah	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan ketersediaan perangkat keras untuk aplikasi SIKD/SIKS dari ANRI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 23. Ketersediaan Perangkat Keras untuk SIKD/SIKS ANRI**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 14% LKD Kabupaten/Kota yang sudah memiliki ketersediaan hardware dan sudah dimanfaatkan untuk SIKD/SIKS ANRI, 23% hanya tersedia *hardware* untuk SIKD, 6% hanya

tersedia *hardware* untuk SIKS, dan 54% belum memiliki hardware baik untuk SIKD maupun SIKS dari ANRI, sementara 3% tidak menjawab.

6. Ketersediaan Perangkat Keras untuk SIKD/SIKS yang selain dari ANRI.

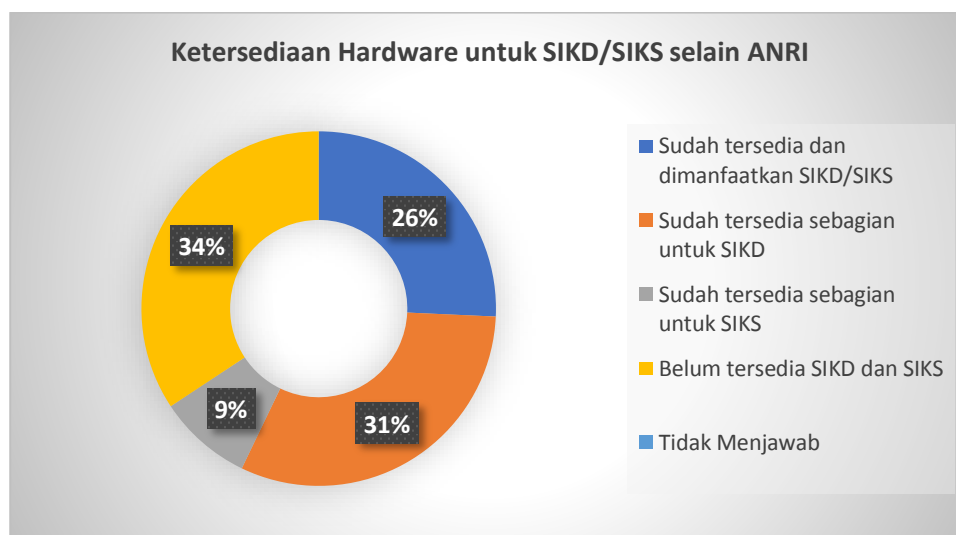
Berikut adalah resume ketersediaan perangkat keras untuk aplikasi SIKD/SIKS selain dari ANRI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 27. Ketersediaan Perangkat Keras untuk SIKD/SIKS selain dari ANRI**

No	Ketersediaan perangkat keras	Jumlah
1	Sudah tersedia dan dimanfaatkan SIKD/SIKS	9
2	Sudah tersedia sebagian untuk SIKD	11
3	Sudah tersedia sebagian untuk SIKS	3
4	Belum tersedia SIKD dan SIKS	12
	Jumlah	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan ketersediaan perangkat keras untuk aplikasi SIKD/SIKS dari ANRI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 24. Ketersediaan *Hardware* untuk SIKD/SIKS selain dari ANRI**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 26% LKD Kabupaten/Kota yang sudah memiliki ketersediaan hardware dan sudah dimanfaatkan untuk SIKD/SIKS selain dari ANRI, 31% hanya tersedia hardware untuk SIKD, 9% hanya tersedia hardware untuk SIKS, dan 34% belum memiliki hardware baik untuk SIKD maupun SIKS.

## E.2. Kondisi Ketersediaan Sarana Prasarana per LKD Kab/Kota

Kondisi ketersediaan sarana prasarana yang meliputi *software*, *sub domain* dan *hardware* atau perangkat keras pada setiap Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat seperti berikut.

**Tabel 28. Skor Variabel Ketatalaksanaan per LKD Kab/Kota**

No	Kabupaten	Skor	Kategori
1	Kab. Rembang	3.83	Sangat Baik
2	Kab. Kebumen	3.67	Sangat Baik
3	Kota Pekalongan	3.67	Sangat Baik
4	Kota Salatiga	3.50	Sangat Baik
5	Kab. Wonosobo	3.00	Baik
6	Kab. Pati	3.00	Baik
7	Kab. Kota Semarang	3.00	Baik
8	Kab. Kudus	2.83	Baik
9	Kab. Magelang	2.67	Baik
10	Kab. Cilacap	2.50	Cukup
11	Kab. Boyolali	2.50	Cukup
12	Kab. Purbalingga	2.33	Cukup
13	Kab. Sukoharjo	2.33	Cukup
14	Kab. Semarang	2.33	Cukup
15	Kab. Temanggung	2.33	Cukup
16	Kab. Brebes	2.33	Cukup
17	Kab. Purworejo	2.17	Cukup
18	Kota Tegal	2.17	Cukup
19	Kab. Karanganyar	2.00	Cukup
20	Kab. Blora	2.00	Cukup
21	Kab. Jepara	2.00	Cukup
22	Kota Surakarta	2.00	Cukup
23	Kab. Tegal	1.83	Cukup
24	Kab. Banyumas	1.67	Kurang Baik
25	Kab. Klaten	1.67	Kurang Baik
26	Kab. Wonogiri	1.67	Kurang Baik
27	Kab. Pekalongan	1.67	Kurang Baik
28	Kab. Pemasang	1.67	Kurang Baik
29	Kab. Banjarnegara	1.60	Kurang Baik
30	Kab. Kendal	1.50	Kurang Baik
31	Kab. Batang	1.50	Kurang Baik
32	Kab. Grobogan	1.33	Kurang Baik
33	Kab. Demak	1.33	Kurang Baik
34	Kab. Sragen	1.17	Kurang Baik
35	Kota Magelang	1.00	Kurang Baik
	<b>Rata-Rata</b>	<b>2.20</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 4 LKD Kabupaten/Kota yang kondisi ketersediaan sarana prasarannya sangat baik, 5 LKD yang ketersediaan sarana prasarannya dalam kategori Baik, 14 LKD yang ketersediaan sarana prasarannya dalam kategori Cukup dan sisanya 12 dalam kondisi yang Kurang Baik. Secara rata-rata ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi Cukup.

## F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan faktor kunci keberhasilan penerapan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi. Variabel ini terdiri dari beberapa indikator seperti latar belakang pendidikan di bidang TI baik untuk SDM pengelola arsip maupun arsiparis, penugasan SDM berbasis TI serta pengembangan pengetahuan TI untuk SDM baik arsiparis maupun non arsiparis.

### F.1. Kajian per Indikator pada Variabel Sumber Daya Manusia

#### 1. Latar belakang pendidikan SDM Pengelola Arsip Berbasis TI.

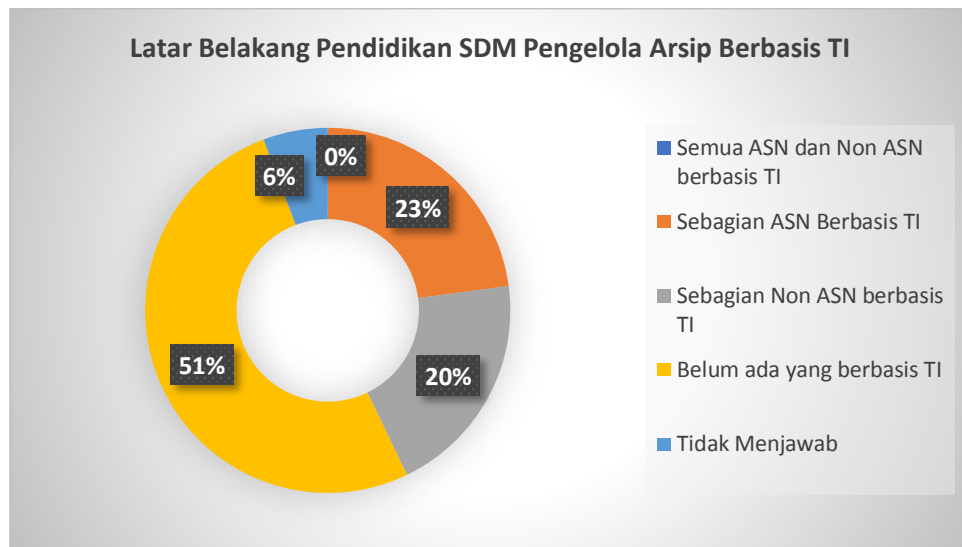
Berikut adalah resume dari kondisi latar belakang pendidikan SDM Pengelola Arsip Berbasis TI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 29. Latar Belakang Pendidikan SDM Pengelola Arsip berbasis TI**

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1	Semua ASN dan Non ASN berbasis TI	0
2	Sebagian ASN Berbasis TI	8
3	Sebagian Non ASN berbasis TI	7
4	Belum ada yang berbasis TI	18
5	Tidak Menjawab	2
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase latar belakang pendidikan SDM Pengelola Arsip Berbasis TI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

### **Gambar 25. Latar belakang pendidikan SDM Pengelola Arsip**

Berdasarkan kuesioner, belum ada LKD yang semua SDM pengelola arsipnya (baik ASN maupun Non ASN) memiliki latar belakang pendidikan berbasis TI, 23% LKD Kabupaten/Kota memiliki sebagian SDM ASN yang latar belakang pendidikannya berbasis TI, 20% memiliki sebagian SDM Non-ASN yang pendidikannya berbasis TI, 51% belum memiliki ASN atau Non ASN yang pendidikannya berbasis TI serta 6% responden tidak menjawab.

#### 2. Latar belakang pendidikan SDM Arsiparis Berbasis TI.

Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah, termasuk kegiatan mengurus, memberkaskan dan mengelola arsip-arsip aktif. Kegiatan kearsipan adalah kegiatan dalam bidang pembinaan, pengelolaan dan pelayanan arsip, penilaian dan penyelesaian arsip serta pemasyarakatan arsip.

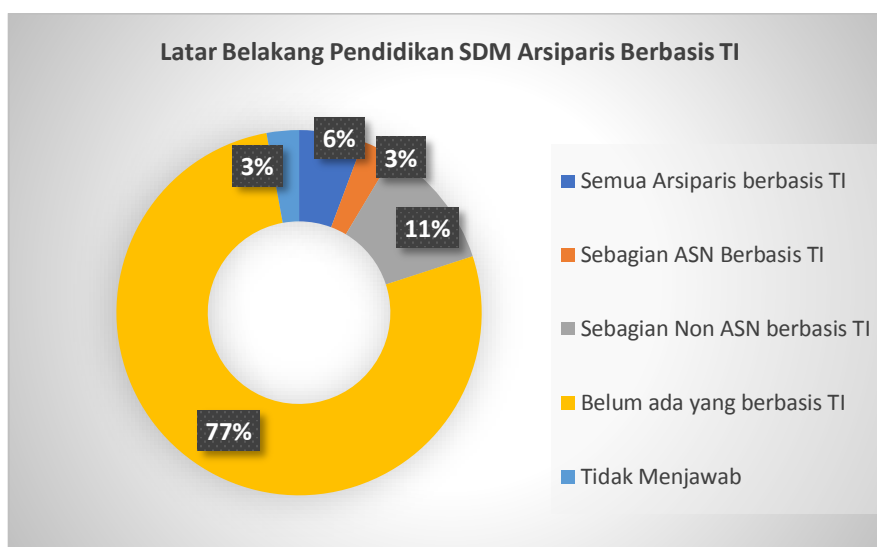
Berikut adalah resume dari latar belakang pendidikan SDM Arsiparis Berbasis TI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 30. Latar Belakang Pendidikan SDM Arsiparis pengelola arsip berbasis TI**

No	Latar Belakang Pendidikan SDM Arsiparis	Jumlah
1	Semua Arsiparis berbasis TI	2
2	Sebagian besar Arsiparis Berbasis TI	1
3	Sebagian kecil Arsiparis Berbasis TI	4
4	Belum ada yang berbasis TI	27
5	Tidak Menjawab	1
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase latar belakang pendidikan SDM Arsiparis Pengelola Arsip Berbasis TI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 26. Latar belakang pendidikan Arsiparis Pengelola Arsip**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 6% LKD yang semua SDM Arsiparis-nya berbasis TI, 3% LKD yang sebagian besar arsiparisnya berbasis TI, 11% yang sebagian kecil arsiparisnya berbasis TI, 77% tidak memiliki arsiparis yang berbasis TI serta 3% responden tidak menjawab.

### 3. Penugasan SDM Pengelola Arsip Berbasis TI.

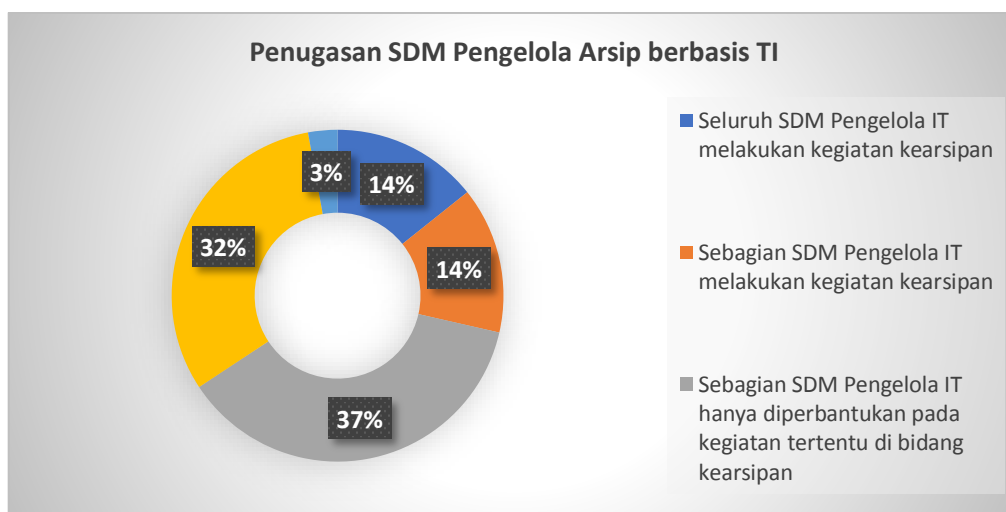
Terkait dengan penugasan SDM Pengelola Arsip Berbasis TI, berikut adalah resume dari hasil kuesioner pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 31. Penugasan SDM Pengelola Arsip berbasis TI**

No	Penugasan SDM	Jumlah
1	Seluruh SDM Pengelola IT melakukan kegiatan kearsipan	5
2	Sebagian SDM Pengelola IT melakukan kegiatan kearsipan	5
3	Sebagian SDM Pengelola IT hanya diperbantukan pada kegiatan tertentu di bidang kearsipan	13
4	Belum ada SDM Pengelola IT	11
5	Tidak Menjawab	1
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase penugasan Pengelola Arsip Berbasis TI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 27. Penugasan SDM Pengelola Arsip**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 14% LKD yang seluruh SDM Pengelola IT melakukan kegiatan kearsipan, 14% LKD yang sebagian SDM Pengelola IT melakukan kegiatan kearsipan, 37% yang sebagian SDM Pengelola IT-nya hanya diperbantukan pada kegiatan tertentu di

bidang kearsipan, 32% tidak memiliki SDM Pengelola IT serta 3% responden tidak menjawab.

4. Pengembangan SDM Pengelola Arsip Berbasis TI bagi Arsiparis.

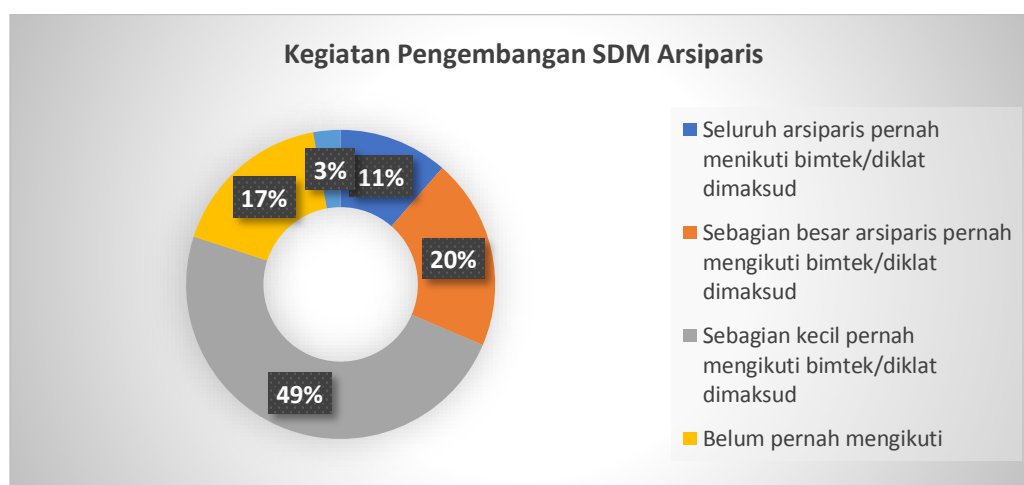
Pengembangan SDM Pengelola Arsip Berbasis TI bagi Arsiparis menilai tingkat keikutsertaan arsiparis dalam kegiatan bimtek atau diklat pengelolaan kearsipan yang berbasis Teknologi Informasi. Terkait dengan pengembangan SDM Pengelola Arsip Berbasis TI tersebut, berikut adalah resume dari hasil kuesioner pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 32. Pengembangan SDM Arsiparis**

No	Pengembangan SDM Arsiparis	Jumlah
1	Seluruh arsiparis pernah mengikuti bintek/diklat pengelolaan kearsipan berbasis TI	4
2	Sebagian besar arsiparis pernah mengikuti bintek/diklat pengelolaan kearsipan berbasis TI	7
3	Sebagian kecil pernah mengikuti bintek/diklat pengelolaan kearsipan berbasis TI	17
4	Belum pernah mengikuti bintek/diklat	6
5	Tidak Menjawab	1
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase kegiatan pengembangan SDM Arsiparis pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 28. Pengembangan SDM Arsiparis**

Berdasarkan kuesioner, terdapat 11% LKD yang seluruh SDM Arsiparisnya pernah mengikuti bimtek/diklat pengelolaan arsip berbasis TI, 20% LKD yang sebagian arsiparis-nya pernah mengikuti bintek/diklat pengelolaan arsip berbasis TI, 49% yang sebagian kecil arsiparisnya pernah mengikuti bimtek/diklat, 17% LKD yang arsiparisnya belum pernah mengikuti kegiatan bimtek/diklat pengelolaan arsip berbasis TI serta 3% responden tidak menjawab.

5. Pengembangan SDM Pengelola Arsip Berbasis TI bagi Non Arsiparis.

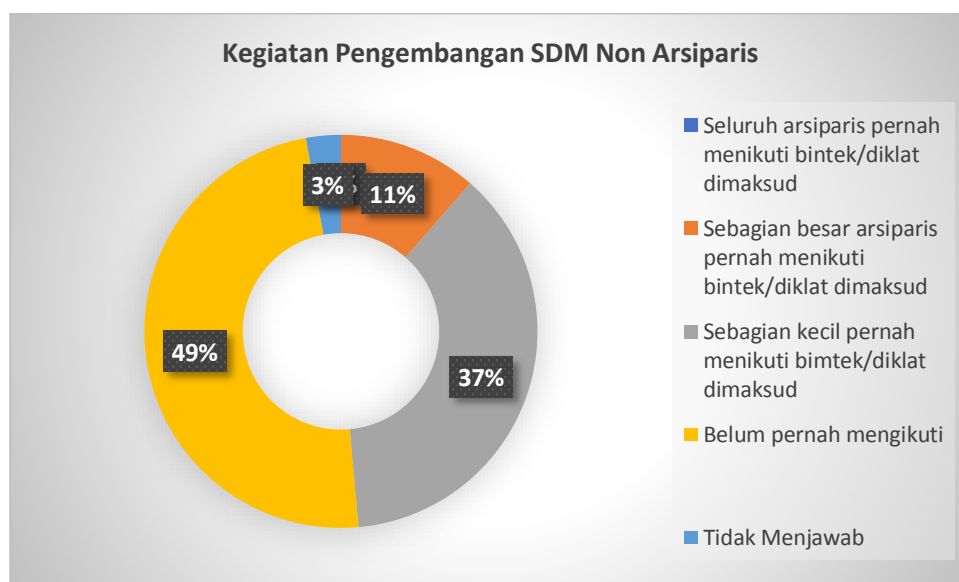
Pengembangan SDM Pengelola Arsip Berbasis TI bagi Non Arsiparis menilai tingkat keikutsertaan SDM non arsiparis dalam kegiatan bimtek atau diklat pengelolaan kearsipan yang berbasis Teknologi Informasi. Terkait dengan pengembangan SDM Non Arsiparis tersebut, berikut adalah *resume* dari hasil kuesioner pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 33. Pengembangan SDM Non Arsiparis**

No	Pengembangan SDM Non Arsiparis	Jumlah
1	Seluruh arsiparis pernah mengikuti bintek/diklat pengelolaan kearsipan berbasis TI	0
2	Sebagian besar arsiparis pernah mengikuti bintek/diklat pengelolaan kearsipan berbasis TI	4
3	Sebagian kecil pernah mengikuti bintek/diklat pengelolaan kearsipan berbasis TI	13
4	Belum pernah mengikuti bintek/diklat	17
5	Tidak Menjawab	1
	Total	35

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Lebih jelasnya, Gambar di bawah ini menunjukkan grafik prosentase kegiatan pengembangan SDM Non Arsiparis pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

### **Gambar 29. Pengembangan SDM Non Arsiparis**

Berdasarkan kuesioner, tidak ada LKD yang seluruh SDM non Arsiparis-nya pernah mengikuti bintek/diklat pengelolaan arsip berbasis TI, 11% LKD yang sebagian SDM Non arsiparisnya pernah mengikuti bintek/diklat pengelolaan arsip berbasis TI, 37% yang sebagian kecil SDM Non arsiparisnya pernah mengikuti bintek/diklat, 49% LKD yang SDM Non arsiparisnya belum pernah mengikuti kegiatan bintek/diklat pengelolaan arsip berbasis TI serta 3% responden tidak menjawab.

## **F.2. Kondisi Sumber Daya Manusia per LKD Kabupaten/Kota**

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa variabel Sumber Daya Manusia yang diolah meliputi latar belakang pendidikan, penugasan serta keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan SDM. Selanjutnya kondisi sumber daya manusia per LKD Kabupaten/Kota bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 34. Skor Variabel Sumber Daya Manusia per LKD Kab/Kota**

<b>No</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>
1	Karanganyar	3.20	Baik
2	Purbalingga	2.80	Baik
3	Jejara	2.80	Baik
4	Brebes	2.60	Baik
5	Cilacap	2.40	Cukup
6	Wonosobo	2.40	Cukup
7	Kendal	2.40	Cukup
8	Blora	2.25	Cukup
9	Kudus	2.20	Cukup
10	Kebumen	2.00	Cukup
11	Boyolali	2.00	Cukup
12	Temanggung	2.00	Cukup
13	Kab. Tegal	2.00	Cukup
14	Sragen	1.80	Cukup
15	Rembang	1.80	Cukup
16	Pemalang	1.80	Cukup
17	Kota Magelang	1.80	Cukup
18	Klaten	1.60	Kurang Baik
19	Sukoharjo	1.60	Kurang Baik
20	Pati	1.60	Kurang Baik
21	Batang	1.60	Kurang Baik
22	Banyumas	1.40	Kurang Baik
23	Kab. Magelang	1.40	Kurang Baik
24	Grobogan	1.40	Kurang Baik
25	Kab. Semarang	1.40	Kurang Baik
26	Kab. Pekalongan	1.40	Kurang Baik
27	Kota Salatiga	1.40	Kurang Baik
28	Kota Surakarta	1.40	Kurang Baik
29	Kota Pekalongan	1.40	Kurang Baik
30	Kota Tegal	1.40	Kurang Baik
31	Purworejo	1.20	Kurang Baik
32	Kota Semarang	1.20	Kurang Baik
33	Banjarnegara	1.00	Kurang Baik
34	Wonogiri	1.00	Kurang Baik
35	Demak	1.00	Kurang Baik
	<b>Rata-Rata</b>	<b>1.79</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada LKD kabupaten/kota yang kondisi SDM-nya dalam kategori yang sangat baik, 4 LKD yang kondisi SDM-nya dalam kategori Baik, 13 LKD yang kondisi SDM-nya dalam

kategori Cukup dan sisanya 18 LKD memiliki kondisi SDM yang Kurang Baik. Secara rata-rata kondisi SDM dalam kategori Cukup.

## G. RESUME PER INDIKATOR EMPIRIS

Secara agregat, terdapat 28 indikator empiris yang digunakan untuk menjelaskan pengembangan arsip berbasis IT di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 35 di bawah.

**Tabel 35. Karakteristik Indikator Empiris**

Indicator	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
KB1	2.257	2	1	4	1.104	-1.193	0.388
KB2	2.514	2	1	4	1.105	-1.358	0.161
KB3	2.829	3	1	4	1.134	-1.492	-0.26
KB4	2.286	2	1	4	1.058	-1.131	0.294
KB5	2.794	3	1	4	1.132	-1.503	-0.208
KB6	2.677	3	1	4	1.202	-1.531	-0.266
KB7	2	1	1	4	1.242	-1.03	0.842
KB8	2.371	2	1	4	0.897	-0.344	0.654
KB9	1.629	1	1	4	0.928	1.413	1.508
SA1	2.771	3	1	4	1.173	-1.358	-0.417
SA2	1.853	2	1	4	1.033	-0.255	0.981
SA3	2.455	3	1	4	1.183	-1.567	-0.059
SA4	1.455	1	1	4	0.988	3.008	2.112
SA5	1.8	1	1	4	1.141	-0.293	1.138
SA6	1.706	1	1	4	1.044	-0.255	1.125
SA7	2.429	2	1	4	1.316	-1.823	0.084
SA8	3.059	4	1	4	1.259	-1.085	-0.857
SP1	2.424	3	1	4	1.074	-1.389	-0.332
SP2	2.8	3	1	4	1.064	-0.628	-0.768
SP3	1.588	1	1	4	1.088	0.481	1.485
SP4	1.971	1	1	4	1.158	-1.251	0.634
SP5	1.971	1	1	4	1.175	-1.308	0.628
SP6	2.486	3	1	4	1.204	-1.603	-0.119
SDM1	1.697	1	1	3	0.834	-1.301	0.645
SDM2	1.343	1	1	4	0.791	5.895	2.542
SDM3	2.086	2	1	4	1.025	-0.66	0.653
SDM4	2.229	2	1	4	0.897	-0.326	0.507
SDM5	1.600	1	1	3	0.685	-0.564	0.737

Sumber: Hasil olahan Smart PLS-v3, 2019

Keterangan: KB : Ketatalaksanaan/Kebijakan  
 SA : Sistem/Aplikasi  
 SP : Sarana Prasarana  
 SDM : Sumber Daya Manusia

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator-indikator dari konsep Ketatalaksanaan/Kebijakan memiliki nilai rata-rata dengan skor 2. Begitu pula dengan konsep Sistem/Aplikasi dan Sarana Prasarana yang memiliki nilai rata-rata dengan skor 2. Dapat dipahami bahwa indikator-indikator dari ketiga konsep tersebut memiliki karakteristik atau kinerja yang “**Cukup**”. Sedangkan konsep Sumber Daya Manusia memiliki nilai rata-rata dengan skor 1. Dapat dipahami bahwa indikator-indikator dari konsep tersebut memiliki karakteristik atau kinerja yang “**Kurang Baik**”.

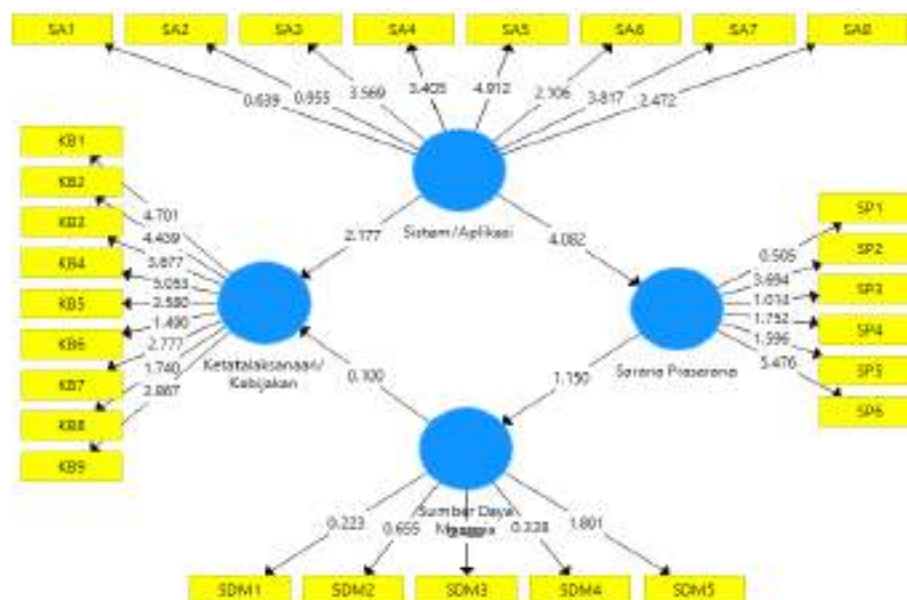
Lebih lanjut, hasil analisis dengan menggunakan Smart PLS dapat dijelaskan melalui tabel 36 dan gambar 2 di bawah.

**Tabel 36. Causality Test Result**

Path	Original Sample	STDEV	T Statistics	P Values	Result
SP → SDM	0.570	0.495	1.150	0.251	Rejected
SA → KB	0.483	0.222	2.177	0.030	Accepted
SA → SP	0.654	0.160	4.082	0.000	Accepted
SDA → KB	-0.028	0.276	0.100	0.921	Rejected

Sumber: Hasil olahan Smart PLS-v3, 2019

Tabel 36 adalah tabel causality test result dan Gambar 2 menunjukkan *The Outer Model Model* test. Keduanya menunjukkan bahwa Sistem/Aplikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Ketatalaksanaan/Kebijakan. Begitu pula dengan Sistem/Aplikasi juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Sarana Prasarana. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa arah pengembangan ke depan perlu memperhatikan kesiapan dan ketersediaan Sistem/Aplikasi dalam rangka pengembangan Kearsipan Berbasis IT.



Sumber: Hasil olahan Smart PLS-v3, 2019

**Gambar 30. The Outer Model Test**

Sedangkan Sarana Prasarana tidak berpengaruh signifikan terhadap Sumber Daya Manusia. Begitu pula dengan Sumber Daya Manusia yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketatalaksanaan/Kebijakan. Dapat dipahami bahwa faktor Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia bukan merupakan faktor penentu utama Pengembangan Kearsipan Berbasis IT.

## H. RESUME PER LKD KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan variabel Ketatalaksanaan/Kebijakan, Sistem/Aplikasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia, Tabel 35 menunjukkan kondisi pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi di LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota, 8 diantaranya dalam kategori **Baik** yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang dan Kabupaten Jepara.

**Tabel 37. Skor 4 variabel per LKD Kab/Kota**

No	Kabupaten	Skor				Rata-Rata	Kategori
		Tatalaksana	Sistem	Sarpras	SDM		
1	Purbalingga	3.78	3.67	2.33	2.80	3.14	Baik
2	Kebumen	3.00	3.25	3.67	2.00	2.98	Baik
3	Rembang	2.00	3.83	3.83	1.80	2.87	Baik
4	Pati	4.00	2.17	3.00	1.60	2.69	Baik
5	Kudus	3.22	2.50	2.83	2.20	2.69	Baik
6	Wonosobo	2.44	2.67	3.00	2.40	2.63	Baik
7	Kota Semarang	2.44	3.00	3.67	1.40	2.63	Baik
8	Jepara	3.22	2.00	2.00	2.80	2.51	Baik
9	Boyolali	2.89	2.50	2.50	2.00	2.47	Cukup
10	Karanganyar	2.33	1.83	2.00	3.20	2.34	Cukup
11	Purworejo	3.22	2.50	2.17	1.20	2.27	Cukup
12	Kota Magelang	3.78	1.83	2.00	1.40	2.25	Cukup
13	Kota Salatiga	3.78	2.33	1.00	1.80	2.23	Cukup
14	Kota Tegal	3.00	2.00	1.83	2.00	2.21	Cukup
15	Brebes	2.22	1.50	2.33	2.60	2.16	Cukup
16	Kota Surakarta	2.22	2.17	3.00	1.20	2.15	Cukup
17	Cilacap	2.22	1.17	2.50	2.40	2.07	Cukup
18	Kendal	2.56	1.50	1.50	2.40	1.99	Cukup
19	Tegal	1.00	2.00	3.50	1.40	1.98	Cukup
20	Semarang	2.33	1.67	2.33	1.40	1.93	Cukup
21	Sukoharjo	1.67	2.00	2.33	1.60	1.90	Cukup
22	Pekalongan	2.11	2.33	1.67	1.40	1.88	Cukup
23	Blora	1.25	2.00	2.00	2.25	1.88	Cukup
24	Klaten	2.22	2.00	1.67	1.60	1.87	Cukup
25	Temanggung	2.00	1.00	2.33	2.00	1.83	Cukup
26	Magelang	1.22	2.00	2.67	1.40	1.82	Cukup
27	Kota Pekalongan	2.11	1.50	2.17	1.40	1.79	Cukup
28	Batang	2.22	1.83	1.50	1.60	1.79	Cukup
29	Grobogan	2.13	2.17	1.33	1.40	1.76	Cukup
30	Sragen	2.22	1.50	1.17	1.80	1.67	Kurang Baik
31	Demak	2.22	1.83	1.33	1.00	1.60	Kurang Baik
32	Pemalang	1.44	1.17	1.67	1.80	1.52	Kurang Baik
33	Banyumas	1.13	1.17	1.67	1.40	1.34	Kurang Baik
34	Banjarnegara	1.67	1.00	1.60	1.00	1.32	Kurang Baik
35	Wonogiri	1.13	1.00	1.67	1.00	1.20	Kurang Baik
	<b>Rata-Rata</b>	<b>2.35</b>	<b>2.02</b>	<b>2.22</b>	<b>1.79</b>	<b>2.10</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sejumlah 21 Kabupaten/Kota dalam kategori **Cukup** yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Purworejo, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten

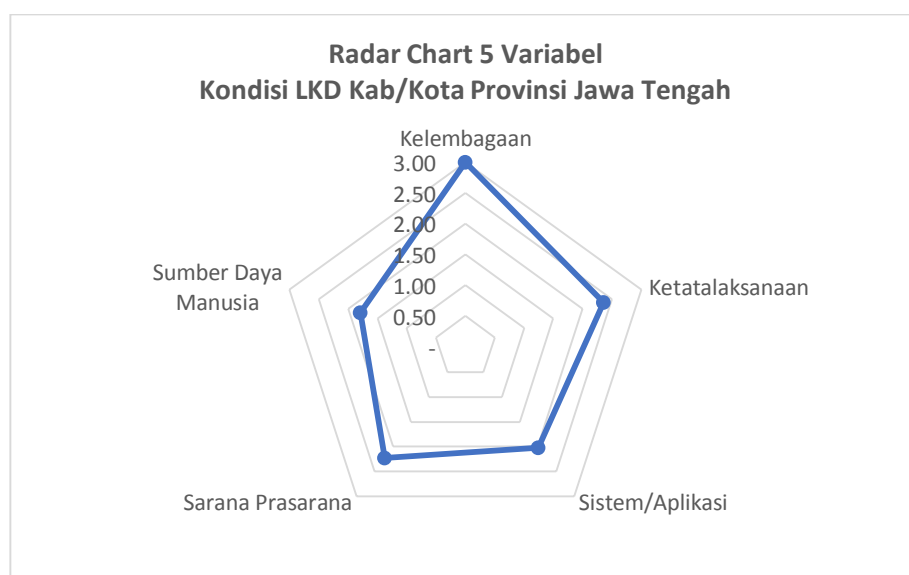
Pekalongan, Kabupaten Blora, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Grobogan. Sedangkan sejumlah 6 kabupaten/kota masuk kategori **Kurang Baik** yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, dan yang terakhir adalah Kabupaten Wonogiri.

## I. ANALISIS KAJIAN

Berdasarkan kajian hasil pengolahan dari data-data kuesioner di atas dapat diperoleh beberapa analisis kondisi terkait dengan pengelolaan arsip berbasis TI sebagai berikut.

### 1. Kondisi Umum Pengelolaan Arsip Berbasis TI pada LKD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dari Tabel 35 tentang kondisi pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi di LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi pengelolaan arsip berbasis TI di Jawa Tengah masih belum memuaskan.



Sumber: diolah dari Kuesioner (2019)

**Gambar 31. Radar Chart kondisi LKD Kab/Kota di Jateng terkait pengelolaan arsip berbasis TI**

Dari grafik radar pada gambar di atas terlihat bahwa kelemahan yang paling menonjol adalah dari aspek sumber daya manusia, yaitu kurangnya SDM pengelola arsip dengan latar belakang pendidikan TI dan kurangnya pengembangan SDM khususnya bintek dan pelatihan pengelolaan arsip berbasis TI. Dari data kuesioner bahkan tercatat ada 17 LKD Kabupaten/Kota yang tidak memiliki SDM Pengelola Arsip dengan latar belakang pendidikan TI yaitu diantaranya Kabupaten Banyumas, Purworejo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Rembang, Pati, Demak, Semarang, Temanggung, Pekalongan, Pemalang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

## **2. Regulasi terkait dengan Penerapan Sistem Kearsipan berbasis Teknologi Informasi belum tersosialisasikan dengan baik.**

Berdasarkan data kuesioner, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang mendukung penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi belum tersosialisasikan dengan baik, khususnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terbukti baru tercatat 20-30% LKD Kabupaten/kota yang sudah secara intensif menerapkan dan mensosialisasikan kedua Undang-Undang tersebut. Bahkan terdapat 31% LKD Kabupaten/kota yang sama sekali belum menerapkan regulasi tersebut khususnya untuk Undang-Undang ITE. Undang-Undang yang sudah cukup tersosialisasikan dengan baik dan sudah diterapkan adalah Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana sudah diterapkan oleh 86% LKD Kabupaten/Kota walaupun 31% diantaranya baru menerapkan sebagian. Hal itu mengindikasikan bahwa pengelolaan arsip secara konvensional sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum banyak menyentuh pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi.

### **3. Ketersediaan Regulasi daerah tentang penyelenggaraan kearsipan sebagai dasar hukum pengelolaan arsip berbasis TI.**

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan lembaga, organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, yang dalam hal ini dalam operasional pengelolaan arsip berbasis TI. Regulasi merupakan instrumen penting dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan kearsipan. Dengan telah tersedianya regulasi di tingkat daerah, maka petunjuk atau pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan dan pengawasan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan karakteristik atau kondisi di daerah tersebut.

Berdasarkan data kuesioner, baru 51% LKD kabupaten/kota yang sudah memiliki regulasi tentang penyelenggaraan kearsipan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi. Untuk itu perlu dilakukan upaya agar daerah yang belum memiliki regulasi terkait dapat segera mewujudkannya, sehingga memberikan fondasi hukum yang lebih kokoh dalam penerapan pengelolaan arsip berbasis TI di daerah.

### **4. SIKN/JIKN yang belum termanfaatkan dengan baik di daerah.**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ANRI sudah mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). SIKN merupakan aplikasi antar-muka yang dapat digunakan oleh Simpul Jaringan untuk memasukkan informasi kearsipan miliknya untuk selanjutnya dipublikasikan pada website JIKN.

SIKN dapat digunakan untuk mengolah informasi kearsipan yang dimiliki dalam rangka membantu temu balik baik dalam format digital maupun lokasi fisik arsip di tempat penyimpanannya. Sedangkan JIKN memungkinkan masyarakat mengakses informasi kearsipan yang dikelola oleh lembaga kearsipan nasional, lembaga kearsipan daerah,

lembaga kearsipan perguruan tinggi, serta lembaga dan kementerian di pusat maupun daerah.

Meskipun memberikan efisiensi dalam pengembangan dan pengelolaan kearsipan di daerah, sangat disayangkan bahwa belum banyak LKD kabupaten/kota yang sudah memanfaatkannya. Berdasarkan kuesioner baru tercatat 37% LKD kabupaten/kota yang sudah menjadi anggota dan memanfaatkannya secara aktif. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut agar lebih banyak lagi LKD Kabupaten/Kota yang dapat memanfaatkan sistem yang sudah ada tersebut.

#### **5. SIKD/SIKS juga belum termanfaatkan dengan baik di daerah.**

ANRI juga sudah mengembangkan *software* untuk pengelolaan arsip dinamis dan statis yang disebut SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) dan SIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis). Kedua aplikasi tersebut dikembangkan ANRI untuk dapat membantu menangani pengelolaan arsip statis dan dinamis di lingkungan lembaga kearsipan serta menyajikannya untuk dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Tetapi seperti halnya SIKN/JIKN, SIKD/SIKS juga belum termanfaatkan dengan baik di daerah. Berdasarkan data yang masuk, baru 22% LKD di daerah yang sudah memanfaatkan SIKD dari ANRI meskipun beberapa diantaranya masih secara *offline*, serta baru 23% LKD di daerah yang sudah memanfaatkan SIKS dari ANRI.

Dari data kuesioner juga dapat disimpulkan adanya beberapa LKD kabupaten/kota yang menggunakan SIKD/SIKS diluar ANRI. Tepatnya terdapat 52% LKD yang menggunakan SIKD diluar ANRI dan 26% LKD yang menggunakan SIKS di luar ANRI. Dengan demikian mereka mengembangkan sendiri aplikasi SIKD/SIKS bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan kearsipan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian secara umum masih banyak LKD yang melakukan pengelolaan arsip statis dan dinamis-nya secara manual

karena mereka belum memanfaatkan SIKD/SIKS baik yang dari ANRI maupun bukan dari ANRI.

## **6. Kesiapan Sarana Prasarana**

Secara umum, ketersediaan software sebenarnya sudah cukup baik walaupun belum sepenuhnya *software* tersebut dioperasionalkan. Dari data yang masuk, 60% LKD kabupaten/kota sudah memiliki SIKD/SIKS dari ANRI (walaupun baru 22% yang dioperasionalkan), sementara 74% LKD memiliki SIKD/SIKS di luar ANRI (walaupun baru 52% dioperasionalkan). Demikian juga dengan ketersediaan hardware juga dinilai cukup, dimana berdasarkan data yang masuk 75% LKD memiliki perangkat hardware baik berupa *Server*, PC maupun Laptop. Sementara itu sisanya 25% LKD tidak memberikan datanya di dalam kuesioner.

Belum banyak LKD yang memiliki sub-domain bisa dipahami mengingat belum banyaknya SIKD/SIKS yang dioperasionalkan. Sub domain dibutuhkan ketika kita akan mengoperasionalkan SIKD/SIKS secara *online*. Dan tentu saja hal tersebut seharusnya bisa disediakan oleh Diskominfo masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

## **7. Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa kelemahan SDM yang paling menonjol adalah kurangnya SDM pengelolaan arsip serta arsiparis dengan latar belakang pendidikan TI dan kurangnya pengembangan SDM khususnya bintek dan pelatihan pengelolaan arsip berbasis TI. Dari data kuesioner bahkan tercatat ada 17 LKD Kabupaten/Kota yang tidak memiliki SDM Pengelola Arsip dengan latar belakang pendidikan TI yaitu diantaranya Kabupaten Banyumas, Purworejo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Rembang, Pati, Demak, Semarang, Temanggung, Pekalongan, Pemalang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Belum banyaknya SDM dengan latar belakang TI tersebut bisa diantisipasi dengan memperbanyak pelatihan pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi. Pelatihan disarankan dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya pelatihan operasionalisasi dan pelatihan *maintenance*. Pelatihan operasionalisasi meliputi pelatihan penggunaan sistem pengelolaan arsip seperti SIKS atau SIKD, sedangkan pelatihan *maintenance* meliputi pemeliharaan dan pengembangan sistem.

## **BAB IX. PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Kebutuhan akan proses penemuan, penyajian dan pendistribusian informasi kearsipan agar dapat dilakukan dengan cepat, lengkap dan akurat, menuntut pengembangan metode kearsipan dari konvensional ke kearsipan berbasis teknologi informasi. Selain manfaat efisien transaksi dokumen, penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi juga akan memberikan manfaat secara ekonomis, pengelolaan dokumen dengan biaya pengelolaan yang lebih rendah, menghemat kertas (*paperless*) serta keamanan yang lebih terjamin.

Berdasarkan data kuesioner yang telah diolah, pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi di lingkungan LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum aspek kelembagaan LKD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik, ditandai dengan adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota di 35 Kabupaten/Kota yang menaungi keberadaan LKD Kabupaten/Kota tersebut.
2. Aspek ketatalaksanaan LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara umum dalam kategori cukup baik. Kelemahan yang paling menonjol adalah belum tersosialisasinya dengan baik Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebanyak 23% Kabupaten/Kota perlu segera membuat peraturan atau regulasi terkait penyelenggaraan kearsipan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan arsip berbasis TI.
3. Aspek Sistem/Aplikasi juga secara umum dalam kategori Cukup. Sebanyak 63% LKD sudah menjadi anggota SIKN/JIKN walaupun baru separohnya yang sudah aktif. Perlu dilakukan peningkatan keaktifan LKD Kabupaten/Kota dalam SIKN/JIKN untuk

meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kearsipan.

4. Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana juga dalam kategori Cukup. Sebanyak 60% LKD sudah memiliki software SIKD/SIKS dari ANRI, sementara 74% LKD memiliki SIKD/SIKS di luar ANRI walaupun tingkat operasionalisasinya masih rendah. Demikian juga dengan ketersediaan hardware juga dinilai cukup, dimana berdasarkan data yang masuk 75% LKD memiliki perangkat hardware baik berupa Server, PC maupun Laptop.
5. Aspek Sumber Daya Manusia memiliki kelemahan kurangnya SDM Arsiparis dan SDM Pengelolaan Arsip yang memiliki latar belakang pendidikan TI. Tetapi hal tersebut bisa diantisipasi dengan memperbanyak pelatihan pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi khususnya pelatihan operasionalisasi dan pelatihan *maintenance* sistem kearsipan berbasis teknologi informasi baik SIKN, SIKD maupun SIKS.

## **B. REKOMENDASI**

Dari kajian yang sudah dilakukan terkait penerapan pengelolaan kearsipan berbasis TI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dihasilkan.

1. Meningkatkan sosialisasi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang memberikan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi. Prioritas utama sosialisasi adalah pada 31% LKD Kabupaten/Kota yang sama sekali belum menerapkannya.
2. Merekomendasikan penyusunan regulasi atau peraturan terkait penyelenggaran kearsipan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan arsip berbasis TI di tingkat daerah kabupaten/kota, terutama pada 23% LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang belum memiliki regulasi tersebut.

3. Merekomendasikan penyusunan kebijakan, strategi dan percepatan pelaksanaan pengelolaan arsip berbasis TI pada LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Meningkatkan sosialisasi pentingnya keanggotaan SIKN/JIKN serta pemanfaatan SIKD/SIKS baik yang dari ANRI maupun yang bukan dari ANRI. Prioritas utama sosialisasi adalah pada 49% LKD Kabupaten/Kota yang masih melakukan pengelolaan arsip secara konvensional.
5. Meningkatkan kompetensi SDM arsiparis dan pengelola arsip dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi, melalui bintek atau diklat terkait pengelolaan arsip berbasis TI terutama pada 49% LKD Kabupaten/Kota yang SDM-nya belum pernah mengikuti pelatihan sejenis.
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, khususnya *software*, *hardware* serta jaringan internet yang mendukung pengelolaan arsip berbasis TI.

## Daftar Pustaka

- Ghozali, I. (2015). *Partial Least Squares, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan ProgramSmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukoco, B. M. (2010). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiarto, A. & Wahyono, T. (2014). *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Yogyakarta Gava Media.
- Sugiarto, A. (2015). *Manajemen Kearsipan Modern Dari Konvensional ke Basis Komputer*, Yogyakarta: Gava Media.
- Thilmany, J. (2009). The Death of the Filling Cabinet. *Mechanical Engineering*, Dec2009, Vol. 131 Issue 12, , pp. p44-46.
- Wallace, P. E. (1992). *Records Management Intregated Information System*. New Jersey: Prentice Hall Inc.